

STANDAR SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN AGAMA



EDISI 2



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

BAB I. Administrasi Manajemen Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	6
1.1. Informasi Terdokumentasi	6
1.2. Asesmen Internal.....	7
1.3. Tinjauan Manajemen.....	8
1.4. Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara.....	8
1.5. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	9
1.6. Pengendalian Output Tidak Sesuai.....	10
BAB II. Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.....	11
2.1. Formasi Pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.....	11
2.2. Sosialisasi, Orientasi Pegawai dan Komunikasi.....	12
2.3. Pengembangan Pegawai	13
2.4. Pengelolaan Pegawai.....	14
2.5. Penilaian Pegawai , Pendelegasian Wewenang.....	16
2.6. Penilaian Pegawai , Pendelegasian Wewenang.....	17
2.7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Dan Pejabat Negara.....	17
2.8. Pengelolaan Tata Naskah Dinas	18
2.9. Manajemen BMN	19
2.10. Pemeliharaan lingkungan dan Keamanan	21
2.11. Kehumasan dan Keprotokolan	21
2.12. Pengelolaan Perpustakaan	22
2.13. Pelaksanaan Anggaran	22
2.14. Pengelolaan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	24
2.15. Penyusunan Laporan Keuangan	24
2.16. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran.....	25
2.17. Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKjIP).....	26
2.18. Penyusunan Laporan	27
2.19. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	27
BAB III. Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	29
3.1. Pelayanan Informasi	29

3.2.	Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	30
3.3.	Pelayanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	33
3.4.	Pelayanan Penerimaan Perkara.....	34
3.5.	Pelayanan Sidang Terpadu	35
3.6.	Penetapan Majelis Hakim (PMH)	35
3.7.	Penugasan Panitera Pengganti	36
3.8.	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	37
3.9.	Penetapan Hari Sidang	37
3.10.	Pemanggilan Para Pihak	38
3.11.	Pelayanan Pemanggilan Tergugat / Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan	39
3.12.	Pelayanan Pemanggilan Tergugat / Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan.....	40
3.13.	Pelayanan Pemanggilan Tergugat / Termohon Yang Berada Diluar Negeri	40
3.14.	Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain	41
3.15.	Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain	43
3.16.	Kegiatan Persidangan	44
3.17.	Pelayanan Mediasi.....	45
3.18.	Pelayanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir	46
3.19.	Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	46
3.20.	Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain	47
3.21.	Pelayanan Pemeriksaan Setempat	48
3.22.	Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	49
3.23.	Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain	50
3.24.	Pelayanan Tambah Biaya Panjar Perkara.....	51
3.25.	Pelayanan Permohonan Sita Jaminan.....	52
3.26.	Pelayanan Sita Buntut	53
3.27.	Pelayanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	54
3.28.	Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	55

3.29. Pelayanan Pengelolaan Uang Sisa Panjar.....	56
3.30. Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak.....	57
3.31. Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah.....	58
3.32. Pelayanan Ikrar Talak.....	58
3.33. Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai.....	59
3.34. Pelayanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan Ke KUA	60
3.35. Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan	61
3.36. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	62
3.37. Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat.....	63
3.38. Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	64
3.39. Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	66
3.40. Pelayanan Banding.....	68
3.41. Pelayanan Kasasi.....	71
3.42. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	72
3.43. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	74
3.44. Pelayanan Peninjauan Kembali	76
3.45. Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama.....	78
3.46. Pelayanan Prodeo Tingkat Banding	79
3.47. Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi	82
3.48. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama.....	83
3.49. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding	84
3.50. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi	86
3.51. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	87
3.52. Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.....	89
3.53. Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang.....	91
3.54. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain	94
3.55. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain.....	95

3.56. Pelayanan Permohonan Konsinyasi	96
3.57. Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal	98
3.58. Pengarsipan	99
3.59. Pelayanan Pelaporan Perkara	100
3.60. Pengaduan	100
3.61. Pelayanan Permohonan Perceraian PNS dan TNI Polri	102
3.62. Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	102
3.63. Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter.....	103
3.64. Pelayanan Pengelolaan ATK Perkara.....	104
3.65. Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara.....	105
3.66. Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	107
3.67. Penerimaan Perkara Jinayat.....	108
3.68. Penetapan Majelis Hakim (PMH)	109
3.69. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (PP).....	109
3.70. Penetapan Hari Sidang	110
3.71. Pemberitahuan Persidangan Kepada Jaksa.....	110
3.72. Persiapan Persidangan	111
3.73. Diversi	111
3.74. Kesepakatan Diversi.....	113
3.75. Penanganan Laporan Diversi.....	113
3.76. Proses Penahanan	114
3.77. Perpanjangan Penahanan.....	115
3.78. Penangguhan Penahanan	115
3.79. Pelayanan Banding	116
3.80. Pelayanan Kasasi.....	117
3.81. Pelayanan Peninjauan Kembali	118
BAB IV. Sarana Prasarana Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	120
4.1. Sarana Gedung Perkantoran	120
4.2. Sarana Dekorasi Sidang (Sarana dalam Ruang Sidang)	123
4.3. Sarana Ruang Pimpinan Pengadilan Agama/MS (Ketua dan Wakil).....	125
4.4. Sarana Ruang Tamu Ketua.....	126

4.5. Sarana Ruang Rapat	126
4.6. Sarana Ruang Panitera dan Sekretaris.....	127
4.7. Sarana Ruang Hakim.....	128
4.8. Sarana Ruang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.....	129
4.9. Sarana Ruang Panitera Pengganti.....	130
4.10. Sarana Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti.....	130
4.11. Sarana Ruang Bendahara.....	131
4.12. Sarana Ruang Kasir	131
4.13. Sarana Ruang Arsip Perkara dan Umum.....	133
4.14. Sarana Ruang Mediasi PA/MS.....	133
4.15. Sarana Ruang Posbakum	134
4.16. Sarana Ruang Meja Informasi	135
4.17. Sarana Meja Pengaduan	136
4.18. Sarana Ruang Receptionis	136
4.19. Sarana Ruang Tunggu Layanan.....	137
4.20. Sarana Ruang Tunggu Sidang, Kaukus dan Mediasi	137
4.21. Sarana Ruang Pendaftaran.....	138
4.22. Sarana Ruang Laktasi	138
4.23. Sarana Ruang Perpustakaan	139
4.24. Sarana Ruang Komputer/Server/IT	139
4.25. Sarana Ruang Gudang.....	140
4.26. Sarana Ruang Musholla.....	141
4.27. Sarana Ruang Pos Penjaga Keamanan	141
4.28.1 Sarana Ruang Tahanan Pria/Wanita	142
4.28.2 Sarana Ruang Tunggu Tahanan Anak	142
4.28.3 Sarana Ruang Penasehat Hukum	142
4.28.4 Sarana Ruang Tunggu Jaksa	143
4.28.5 Sarana Ruang Polisi	143
4.28.6 Sarana Ruang Diversi	144

BAB I. Administrasi Manajemen Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.1. Informasi Terdokumentasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi	Dokumen Acuan	Skor
1	Organisasi Harus Menetapkan Pendokumentasian Sesuai Dengan Hirarki yang Telah Ditetapkan	Tersedia Dokumen Sesuai Hirarki : 1. Level 1 2. Level 2 3. Level 3 4. Level 4	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2	Organisasi Harus Menetapkan Mekanisme Pengendalian Dokumen	PM Pengendalian Dokumen	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3	Organisasi Harus Menetapkan Mekanisme Pengendalian Rekaman/Arsip	PM Pengendalian Arsip	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
4	Organisasi Harus Mendistribusikan Dokumen SAPM Kepada Masing-Masing Penanggungjawab	Bukti Distribusi Dokumen Terkendali SAPM	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
5	Organisasi Harus Memelihara Seluruh Dokumen Kebijakan yang Dibuat oleh Pimpinan Pengadilan	Daftar Induk Surat Keputusan (SK) Masing-Masing Penanggungjawab	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
6	Organisasi Harus Mengendalikan Seluruh Dokumen	Pengendalian Dokumen Sesuai Hirarki : Melihat Standar 1.5 PP 1 dan Standar 1.5 PP 2	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
7	Organisasi Harus Mengendalikan Seluruh Formulir/Instrumen yang Digunakan	Pengendalian Formulir Melihat Standar 1.5 PP 2 Daftar Induk Formulir	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
8	Organisasi Harus Mengendalikan Seluruh Dokumen Acuan	Daftar Induk Dokumen Acuan	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
9	Organisasi Harus Mengendalikan Jika Terjadi Perubahan Dokumen (SAPM)	1. Bukti Permintaan Penambahan-Perubahan Dokumen 2. Riwayat Perubahan Dokumen	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
10	Organisasi Harus Mengendalikan Distribusi Dokumen (SAPM) ke Pihak Eksternal	1. Daftar Induk Dokumen Tidak Terkendali	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

		2. Surat Pernyataan Penerimaan Dokumen		
11	Organisasi Harus Mengendalikan Rekaman/Arsip	1. Daftar Induk Rekaman/Arsip 2. Bukti Pengendalian Rekaman/Arsip	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
12	Organisasi Harus Mengendalikan Peminjaman Rekaman/Arsip	Tanda Bukti Peminjaman Rekaman/Arsip	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
13	Organisasi Harus Mengendalikan Masa Penyimpanan Rekaman/Arsip	Laporan Pemusnahan dan Perpanjangan Arsip Melihat Standar 1.5 PP 10	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.2. Asesmen Internal				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi	Dokumen Acuan	Skor
1	Organisasi Harus Menetapkan Mekanisme Asessment Internal	PM Asesmen Internal	Perma No 07 tahun 2015 pasal 440 SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2	Organisasi Harus Menetapkan Dan Membentuk Tim Asesmen Internal	SK Tim Asesmen Internal	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3	Organisasi Harus Menetapkan Program Asessment Internal	Program Asesmen Internal	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
4	Organisasi Harus Menetapkan Rencana Pelaksanaan Asessment Internal	Jadwal Pelaksanaan Asesmen Internal Melihat Standar 1.6 PP 3	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
5	Organisasi Harus Melaksanakan Asesmen Internal Secara Terencana	Bukti Pelaksanaan Asesmen Internal : 1. Form Asesmen Internal 2. Daftar Hadir Opening Meeting 3. Daftar Hadir Closing Meeting Melihat 1.6 PP 4 dan PP 5	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
6	Organisasi Harus Melakukan Perbaikan Secara Terencana untuk Memperbaiki	Permintaan Perbaikan CPAR	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

	Ketidaksesuaian Hasil Asesmen Internal			
7	Organisasi Harus Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Perbaikan dan Memberi Tindakan Yang Jelas Terhadap Perencanaan Perbaikan yang Tidak Dilakukan	Surat Peringatan Perbaikan Melihat Standar 1.6 PP 8	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.3. Tinjauan Manajemen				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi	Dokumen Acuan	Skor
1	Organisasi Harus Menetapkan Mekanisme Tinjauan Manajemen	PM Tinjauan Manajemen	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2	Organisasi Harus Melaksanakan Kegiatan Tinjauan Manajemen	Bukti Pelaksanaan Tinjauan Manajemen : 1.Daftar Hadir 2.Materi Tinjauan Manajemen 3.Notulen Tinjauan Manajemen Beserta Lampiran	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3	Organisasi Harus Melakukan Pengendalian Terhadap Hasil Tinjauan Manajemen	Status Tanggal Penyelesaian Pada Notulen Tinjauan Manajemen	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.4. Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi	Dokumen Acuan	Skor
1	Organisasi Harus Menetapkan Mekanisme Evaluasi Kepuasan Pelanggan	PM Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara	SNI ISO 9001:2015 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10
2	Organisasi Harus Menetapkan Tim Evaluasi Kepuasan Pelanggan	SK Tim Evaluasi Kepuasan Pelanggan	SNI ISO 9001:2015 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10

3	Organisasi Harus Menetapkan Peran, Tanggungjawab dan Wewenang Tim Evaluasi Kepuasan Pelanggan	Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Pelanggan	SNI ISO 9001:2015 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10
4	Tim SKM Harus Menetapkan Rencana Pelaksanaan Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara	Jadwal Pelaksanaan SKM	SNI ISO 9001:2015 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10
5	Adanya Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM	SNI ISO 9001:2015 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10
6	Adanya Tindak Lanjut Terhadap Laporan SKM	CPAR Notulen Tinjauan Manajemen	SNI ISO 9001:2015 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.5. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi	Dokumen Acuan	Skor
1	Organisasi Harus Menetapkan Mekanisme Tindakan Perbaikan	PM Tindakan Perbaikan	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2	Organisasi Harus Memastikan Seluruh Ketidaksesuaian Terhadap Proses Sistem Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Dilakukan Perbaikan	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CPAR)	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3	Organisasi Harus Memastikan Hasil Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CPAR) Dilaksanakan dan Dilakukan Verifikasi Serta Dimonitor	Monitoring Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CPAR)	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.6. Pengendalian Output Tidak Sesuai				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi	Dokumen Acuan	Skor
1	Organisasi Harus Menetapkan Mekanisme Pengendalian Output Tidak Sesuai	PM Pengendalian Output Tidak Sesuai	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2	Organisasi Harus Menetapkan Kriteria Output Tidak Sesuai	Kriteria Output Tidak Sesuai	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3	Organisasi Harus Mengendalikan Output Tidak Sesuai	Bukti Pengendalian Output Tidak Sesuai Melihat Standar 1.10 PP 1 Mengacu Standar 1.9 PP 2	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

BAB II. Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.1. Formasi Pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Ada Kejelasan Persyaratan Kompetensi Seluruh Pegawai	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Serta Standar Kompetensi Manajerial	UU no 50 tahun 2009 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46, UU No 5 tahun 2014, PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, KMA 143 tahun 2007, Perka BKN No 7 Tahun 2013, Perka BKN No 8 Tahun 2013, Permenpan No 25 tahun 2016	0 5 10
2	Dilakukan Analisis Kebutuhan Tenaga Sesuai dengan Kebutuhan dan Pelayanan yang Disediakan	Bukti Analisis kebutuhan Pegawai, Usulan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	UU no 50 tahun 2009 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46, UU No 5 tahun 2014, PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Perka BKN No 12 tahun 2011, Kepmenpan No 75 tahun 2004	0 5 10
3	Ada Kejelasan Uraian Tugas Seluruh Pegawai	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Serta Standar Kompetensi Manajerial, Job Discription	Perka BKN No 11 tahun 2013, Perka BKN No 3 tahun 2013, Perma No 7 tahun 2015, Perka BKN No 7 Tahun 2013, Perka BKN No 8 Tahun 2013, Permenpan no 25 tahun 2016, Perka BKN No. 12 tahun 2011	0 5 10
4	Dilakukan Upaya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Sesuai dengan yang Dipersyaratkan	Hasil Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terhadap Persyaratan, Rencana Pemenuhan Kebutuhan dan Tindak Lanjut	UU No. 50 tahun 2009 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46, PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 105, Pasal 106, Pasal	0 5 10

			107, Pasal 108, Pasal 109, Permenpan No. 25 tahun 2016	
5	Ada Pemeliharaan Catatan/Dokumen Sesuai dengan Kompetensi, Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan dan Pengalaman	Kelengkapan File Kepegawaian untuk Semua Pegawai di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang Update, Kelengkapan Pengisian Data SIKEP	KMA 143 tahun 2007, Perka BKN No 18 tahun 2011	0 5 10
6	Ada Struktur Organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Tingkat Pertama yang Ditetapkan	Struktur Organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Perma No 7 tahun 2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.2. Sosialisasi, Orientasi Pegawai dan Komunikasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Ada Prosedur Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Tugas, Peran dan Tanggung Jawab	SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Tugas, Peran dan Tanggung Jawab	Persekma No 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Ada Kegiatan Orientasi Bagi Pegawai Baru	Program Orientasi, Bukti Pelaksanaan Kegiatan Orientasi	Pedoman Instrumen SMM	0 5 10
3	Ada Kegiatan Sosialisasi dan Orientasi Tentang Tugas dan, Tanggung Jawab Kepada Seluruh Pegawai oleh Atasannya Masing Masing	Job description	Pedoman Instrumen SMM	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	
			20% – 79% terpenuhi sebagian	
			<20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.3. Pengembangan Pegawai				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Mekanisme Prosedur dalam Pelaksanaan Pengembangan Pegawai	SOP Pengembangan Pegawai	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Ada Kejelasan Persyaratan Kompetensi Seluruh Pegawai	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Serta Standar Kompetensi Manajerial	UU No 50 tahun 2009 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46, UU No 5 tahun 2014, PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, KMA 143 tahun 2007, Perka BKN No 7 Tahun 2013, Perka BKN No 8 Tahun 2013, Permenpan No 25 tahun 2016	0 5 10
3	Ada Pemeliharaan Catatan/Dokumen Sesuai dengan Kompetensi, Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan dan Pengalaman	Kelengkapan File Kepegawaian untuk Semua Pegawai di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang Update, Kelengkapan Pengisian Data SIKEP	KMA 143 tahun 2007, Perka BKN No 18 tahun 2011, PP No 101 tahun 2000	0 5 10
4	Terdapat Pemantauan dan Pengukuran Potensi Kemampuan Sumber daya Manusia	Bukti Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Potensi Kemampuan Sumber daya Manusia	PP. No. 46 tahun 2011, PP. No. 11 tahun 2017, Perka BKN No. 1 tahun 2013	0 5 10
5	Ada Rencana Pengembangan Pegawai Sesuai dengan Standar Kompetensi	Persyaratan Kompetensi Seluruh Pegawai, Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai (TNA), Usulan Pengembangan Pegawai	PP No 101 tahun 2000, PP. No. 11 tahun 2017, KMA 143 tahun 2007	0 5 10
6	Terdapat Mekanisme Pengelolaan Ijin Belajar dan Tugas Belajar	SOP Tentang Ijin belajar dan Tugas Belajar	Perpres No 12 Tahun 1961, SE Menpan No 4 Tahun 2013, Surat Dirjen Dikti No 33/D/T/2008, Surat Sekma No 008/BUA.2/Izin.01.03/I/2011 Tahun 2011	0 5 10

7	Terdapat Pengelolaan Ijin Belajar dan Tugas Belajar	Bukti Pengelolaan Ijin Belajar dan Tugas Belajar	Perpres No 12 Tahun 1961, SE Menpan No 4 Tahun 2013, Surat Dirjen Dikti No 33/D/T/2008, Surat Sekma No 008/BUA.2/Izin.01.03/I/2011 Tahun 2011	0 5 10
8	Ada Bukti Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Sesuai dengan Rencana Pengembangan Kompetensi	Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai : Sertifikat, Bukti-Bukti Pelatihan	PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, KMA 143 tahun 2007	0 5 10
9	Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan, Pendidikan dan Keterampilan.	Bukti Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Hasil Pengembangan Pegawai	Form Evaluasi Hasil Pelatihan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.4. Pengelolaan Pegawai				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Mekanisme Prosedur dalam Pengelolaan Pegawai	SOP Pengelolaan Pegawai	Persekma No. 2 tahun 2012	0 5 10
2	Ada Ketentuan dan Ketetapan dari Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Terkait Peraturan Internal	SK Peraturan Internal	PP No 42 Tahun 2004 Pasal 13, Kepsekma No 008-A Tahun 2012	0 5 10
3	Terdapat Daftar dan Pengelolaan Data Pegawai	Buku Induk Pegawai	KMA No 143 Tahun 2007, SE BAKN No 08/SE/1983 Lampiran XXI	0 5 10
4	Terdapat Mekanisme Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan Taspen dan BPJS	SOP Pengelolaan Kartu Pegawai dan Kartu Pensiun dan BPJS	PP No 8 Tahun 1989, Keputusan kepala BAKN No 0666/KEP/1974, Perka BKN No 7 Tahun 2008,	0 5 10
5	Terdapat Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan Taspen dan BPJS	Bukti Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan Taspen dan BPJS	PP No 25 Tahun 1981, PP. No. 20 Tahun 2013, Keputusan Kepala BAKN No 0666/KEP/1974, Perka BKN No 7 Tahun 2008,	0 5 10
6	Terdapat Mekanisme Prosedur Pengelolaan Absensi Pegawai	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	Perma No 7 tahun 2016, KMA No 071 tahun 2008, KMA No 069 tahun 2009, Persekma 002 tahun 2012	0 5 10
7	Ada Bukti Pemantauan Kehadiran Pegawai Baik	Laporan Absensi Bulanan	KMA No 071 Tahun 2008, KMA No 069 Tahun 2009, Perma No 7 Tahun 2016	0 5 10

	Secara Manual atau Tehnologi			
8	Terdapat Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Kehadiran Pegawai	Bukti Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Kehadiran Pegawai, Buku Peringatan Lisan, Formulir Peringat Tertulis, Pernyataan Tidak Puas, Penurunan Jabatan, Penundaan KGB dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dengan Hormat dan Tidak Dengan Hormat	PP No 53 Tahun 2010, PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 229, Perma No 7 Tahun 2016, Perma No. 8 Tahun 2016, KMA No 071 Tahun 2008, KMA No 069 tahun 2009,	0 5 10
9	Terdapat Bukti Pelaporan Kehadiran Pegawai ke Pengadilan Tinggi Agama	Bukti Pengiriman Laporan Absensi Bulanan ke Pengadilan Tinggi Agama	KMA No 071 Tahun 2008	0 5 10
10	Terdapat Bukti Pengelolaan Absensi Pegawai	SK Petugas Daftar Hadir, Bukti izin	KMA No 071 Tahun 2008, Perma No 7 Tahun 2016	0 5 10
11	Terdapat Mekanisme Prosedur Pengajuan Cuti Pegawai	SOP Pengajuan Cuti Pegawai	Persekma No. 22 Tahun 2012	0 5 10
12	Ada Bukti Pengajuan Cuti Sesuai dengan Prosedur Yang Telah Di Tetapkan	Bukti Pengajuan Cuti, Laporan Pasca Cuti Diluar Tanggungan Negara	PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 309-341, PP No 24 Tahun 1976, SE Kepala BAKN No 01 Tahun 1977	0 5 10
13	Terdapat Prosedur Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai	SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis	PP No 12 Tahun 2002, PP No 41 Tahun 2002, Perka BKN No 12 Tahun 2002, Perka BKN No 21 Tahun 2002, Perka BKN No 33 Tahun 2011	0 5 10
14	Ada Bukti Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Bukti Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai	PP No 12 Tahun 2002, PP No 41 Tahun 2002, Perka BKN No 12 Tahun 2002, Perka BKN No 21 Tahun 2002	0 5 10
15	Terdapat Prosedur Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala	SOP Kenaikan Gaji Berkala	PP No 7 tahun 1977	0 5 10
16	Ada Bukti Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala	Bukti Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala	PP No 7 tahun 1977	0 5 10
17	Terdapat Penyusunan Tim Baperjakat	SK Tim Baperjakat	PP. No. 100 Tahun 2000, PP No 13 Tahun 2002, Keputusan Kepala BKN No 13 Tahun 2002, KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10
18	Terdapat Bukti Kebijakan Promosi dan Mutasi Pegawai	Bukti Promosi dan Mutasi Pegawai	PP No 13 Tahun 2002, KMA No 192 Tahun 2014, KMA No 193 Tahun 2014, KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10

19	Terdapat Mekanisme Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai	SOP Pengelolaan Ijin perkawinan dan SOP Ijin Perceraian Bagi Pegawai	PP No 10 Tahun 1983, PP No 45 tahun 1990, SE BKN No 8/SE/1983, Sekma No 001 Tahun 2010, SE BKN No 48/SE/1990	0 5 10
20	Terdapat pelaksanaan pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai	Bukti Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai	PP No 10 tahun 1983, PP No 45 tahun 1990, SE BKN No 8/SE/1983, SE BKN No 48/SE/1990, Keputusan SEKMA No. 001/SEK/IZ.07/IV/2010	0 5 10
21	Terdapat Prosedur Pengelolaan Pensiun Pegawai	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai	UU No 11 Tahun 1969, UU 50 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, PP No 32 tahun 1979, Surat Kepala BKN No K.26-30/V.7-3/99 Tahun 2014	0 5 10
22	Ada Bukti Pengelolaan Pensiun	Bukti Pengelolaan Pensiun	UU No 11 Tahun 1969, UU 50 Tahun 2009 Pasal 18, Pasal 38A, UU No 5 Tahun 2014, PP No 32 Tahun 1979, PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 239, SE BKN No 1 Tahun 2014	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.5. Penilaian Pegawai , Pendelegasian Wewenang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Mekanisme Prosedur dalam Penilaian Pegawai dan Pendelegasian Wewenang	SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian Wewenang	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Bukti Perjanjian Kerja Pegawai dengan Atasan dalam Melaksanakan Pekerjaan	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	PP 46 Tahun 2011, PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 228, Perka BKN No 1 Tahun 2013, KMA Nomor 125 Tahun 2009, KMA No 22 tahun 2015	0 5 10
3	Terdapat Kesesuaian SKP dengan Indikator Kinerja Atasan	Kesesuaian SKP dengan Indikator Kinerja Atasan	Perka BKN No 1 Tahun 2013	0 5 10
4	Terdapat Pengukuran Kinerja dan Penilaian Perilaku Secara Periodik	Pengukuran Kinerja dan Penilaian Perilaku Secara Periodik	PP 46 tahun 2011, PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 228, Perka BKN No 1 Tahun 2013	0 5 10
5	Terdapat Bukti Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	PP 46 Tahun 2011, Perka BKN No 1 Tahun 2013	0 5 10
6	Terdapat Bukti Pengiriman/Penyampaian Laporan Hasil Penilaian	Bukti Pengiriman	PP 46 Tahun 2011, PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 228, Perka BKN no 1 Tahun 2013. KMA	0 5 10

	Prestasi Kerja ke Pengadilan Tingkat Banding		Nomor 125 Tahun 2009, KMA No 22 Tahun 2015	
7	Terdapat Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian dan/atau Pelaksana Tugas	Bukti Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian dan/atau Pelaksana Tugas	Surat Kepala BKN No K.26-30/V.5-20-3/99, KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.6. Penilaian Pegawai , Pendelegasian Wewenang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Mekanisme Prosedur Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Bukti Analisa Pemberian Penghargaan Pegawai	Daftar Nominative Pegawai yang Diusulkan	PP No 25 Tahun 1994, PP. No. 11 Tahun 2017 pasal Pasal 231-237, KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10
3	Terdapat Bukti Usulan Pegawai yang Mendapatkan Penghargaan	Surat Usul	PP No 25 Tahun 1994, KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10
4	Terdapat Bukti Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	Bukti Pemberian Penghargaan	PP No 25 Tahun 1994, KMA No 143 Tahun 2007,	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Dan Pejabat Negara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat mekanisme Prosedur Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	Persekma No. 2 Tahun 2012, Keputusan KPK No 07/KPK/2/2005	0 5 10
2	Terdapat Pengawasan Pelaksanaan Pelaporan LHKASN dan LHKPN	Buku Kendali Pelaporan LHKASN dan LHKPN	Persekma No 1 Tahun 2016, Persekma No 04 Tahun 2015 Jo No 2 Tahun 2016, SE Menpan No 3 Tahun 2005, SE Menpan No 1 Tahun 2015	0 5 10

3	Terdapat Pelaporan Kekayaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara	Tanda terima LHKASN dan LHKPN	Persekma No 1 Tahun 2016, Persekma No 04 Tahun 2015 Jo No 2 Tahun 2016, SE Menpan No 3 Tahun 2005, SE Menpan No 1 Tahun 2015	0 5 10
4	Terdapat Updating Data Pelaporan LHKASN dan LHKPN Secara Berkala	Updating Data Pelaporan LHKASN dan LHKPN	Persekma No 1 tahun 2016, Persekma No 04 Tahun 2015 jo No 2 Tahun 2016, SE Menpan No 3 tahun 2005, SE Menpan No 1 Tahun 2015	0 5 10
5	Terdapat Pengumumam Hasil LHKPN	Bukti Pengumuman LHKPN	Keputusan KPK No 07/KPK/2/2005 Tahun 2005	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 2.8. Pengelolaan Tata Naskah Dinas				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur/Mekanisme Pengelolaan Administrasi Persuratan	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (Surat Masuk dan Surat Keluar)	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Pengelolaan Surat Masuk	Agenda Surat Masuk, Kartu Kendali, Lembar Disposisi, lembar pengantar, Lembar Surat Rahasia	KMA 143 tahun 2007, Permenpan 80 Tahun 2012, Surat Keputusan Dirjen Badilag 2017 No. 1351.a/DjA/OT.01.3/04/2016	0 5 10
3	Terdapat Pengelolaan Surat Keluar	Bukti Agenda Surat Keluar, Kartu Kendali Surat Keluar	KMA 143 Tahun 2007, Permenpan 80 Tahun 2012, Surat Keputusan Dirjen Badilag 2017 No. 1351.a/DjA/OT.01.3/04/2016	0 5 10
4	Terdapat Mekanisme Pengelolaan Arsip	SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	KMA 143 Tahun 2007, Perka Anri 20 Tahun 2012	0 5 10
5	Terdapat Tempat Khusus Penyimpanan Arsip	Tempat Penyimpanan Arsip dan Sarana Prasarananya	Perka Anri 20 Tahun 2012,	0 5 10
6	Terdapat petugas arsip	SK Ketua PA	Perka Anri 20 thn 2012	0 5 10
7	Terdapat Pengelolaan Administrasi Pengarsipan	Buku Kendali Arsip	Perka Anri 20 Tahun 2012, KMA No. 11 Tahun 2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.9. Manajemen BMN				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur/Mekanisme Penatausahaan Aset	SOP Penatausahaan Aset	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Dokumen Perolehan BMN	BAST BMN, Bukti Pengesahan Hibah, MPHL-BJS	PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 2006, PMK No. 120 Tahun 2007, PMK No. 136 Tahun 2016, PMK No. 109 Tahun 2009, PMKNo. 50 Tahun 2014, PMK No. 71 Tahun 2016, PMK No. 83 Tahun 2016, Persekma No. 6 Tahun 2015	0 5 10
3	Terdapat Bukti Pencatatan BMN	Daftar Barang Ruangan (DBR), DBL, KIB, SK Penunjukkan Penggunaan BMN, Daftar Kolektif Pengguna Barang, Surat izin Penghunian, SK Petugas Penyimpan Barang	PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 2006, PMK No. 120 Tahun 2007, PMK No. 136 Tahun 2016, PMK No. 109 tahun 2009, PMK No. 50 Tahun 2014, PMK No. 71 Tahun 2016, PMK No. 83 Tahun 2016, Persekma No. 6 Tahun 2015	0 5 10
4	Terdapat Penetapan Status BMN	Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN, SK Penetapan Status	PMK No 246 Tahun 2014, PMK No 87 Tahun 2016	0 5 10
5	Terdapat Pengelolaan Alih Fungsi BMN	Usulan Penetapan Alih Fungsi BMN, Ketetapan Alih Fungsi Dari Pengguna Barang	Perpres No 24 Tahun 2010, PMK No 96 Tahun 2007, PMK No 246 Tahun 2014, PMK No 87 Tahun 2016	0 5 10
6	Terdapat Bukti Pemanfaatan BMN	Ijin Pemanfaatan BMN, Penetapan Tarif, Pemungutan Tarif, Pelaporan	PP 27 Tahun 2014, PP 6 Tahun 2006, PMK 120 Tahun 2007, PMK 136 Tahun 2016, PMK 109 Tahun 2009, PMK 50 Tahun 2014, Pmk 71 Tahun 2016, PMK No 83 tahun 2016, Persekma No 6 Tahun 2015, PMK No 78 Tahun 2014, PMK No 96 Tahun 2007	0 5 10
7	Terdapat Pelaksanaan Pemeliharaan BMN	Rencana Pemeliharaan BMN, Realisasi Pemeliharaan BMN, Kartu Kendali Pemeliharaan BMN	PMK 120 Tahun 2007	0 5 10

8	Terdapat Pengelolaan Pemindahtanganan BMN	Bukti Tukar Menukar BMN, Bukti Hibah BMN, BAST Pemindahtanganan BMN, Bukti Risalah Lelang BMN	Perpres No 24 Tahun 2010, PMK No 96 Tahun 2007, PMK No 246 Tahun 2014, PMK No 87 Tahun 2016, PMK No.111 Tahun 2016	0 5 10
9	Terdapat Pengelolaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN	SK Tim Penghapusan, Daftar Usulan Barang Yang dihapus, Usulan Rekomendasi Penghapusan, Usulan Rekomendasi Penjualan BMN ke BUA, Usulan Rekomendasi Penjualan ke KPKNL, Berita Acara Pemusnahan dan Penghapusan BMN, Risalah Lelang, Usulan Penghapusan BMN	PMK No 50 Tahun 2015, PMK No 83 Tahun 2016	0 5 10
10	Terdapat Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Secara Berkala	Laporan Pengawasan BMN	PMK 120 Tahun 2007, PMK No 83 Tahun 2016, Persekma No 23 Tahun 2016, PMK No 244 Tahun 2012, PMK No 52 Tahun 2016, Perdirjen-3/KN/2013	0 5 10
11	Terdapat Pelaporan BMN	Laporan BMN, Berita Acara Rekonsiliasi BMN Semester I dan Semester II	PMK No 120 Tahun 2007, PMK No 69 Tahun 2016	0 5 10
12	Terdapat Bukti Pengajuan/Pelaporan Kerusakan Asset	Formulir Pelaporan Kerusakan dan Perbaikan Sarana	PMK 120 Tahun 2007	0 5 10
13	Terdapat Bukti Penggunaan/Kepemilikan dan Izin Asset	Buku Kendali, Permohonan, Sertifikat, BPKB, STNK dan IMB	PMK 120 Tahun 2007, PMK No 83 Tahun 2016, Persekma No 23 Tahun 2016	0 5 10
14	Terdapat Prosedur/Mekanisme Penatausahaan Persediaan	SOP Penatausahaan Persediaan	Perdirjen PB No PER-40/PB/2006	0 5 10
15	Terdapat Kepatuhan Pelaksanaan Pencatatan Persediaan Melalui Aplikasi Persediaan	Pencatatan Persediaan Melalui Aplikasi Persediaan	Perdirjen PB No PER-40/PB/2006	0 5 10
16	Terdapat Pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan Secara Periodik (Semester)	Berita Acara Hasil Opname	Perdirjen PB No PER-40/PB/2006	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.10. Pemeliharaan lingkungan dan Keamanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur/Mekanisme Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Jadwal Pembagian Tugas Pemeliharaan Lingkungan dan Jadwal Keamanan	Jadwal Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
3	Terdapat Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	Ceklis Kebersihan dan Keamanan	KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
4	Terdapat Tenaga Keamanan yang Terlatih	Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan/Sertifikat	KMA 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.11. Kehumasan dan Keprotokolan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur/Mekanisme Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan	SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Penunjukkan Petugas Kehumasan	SK Ketua PA	KMA No 143 Tahun 2007, Perma No 7 tahun 2015	0 5 10
3	Terdapat Penunjukkan Tim Keprotokolan	SK Ketua PA	UU No 9 Tahun 2010 Pasal 7, KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10
4	Terdapat Rencana Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	Jadwal Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	UU No 9 Tahun 2010, PP No 62 Tahun 1990, KMA No 143 Tahun 2007, Perma No 7 tahun 2015	0 5 10
5	Terdapat Layanan Informasi dan Terdokumentasi Terstruktur	SK Meja Informasi dan Dokumentasi, SK PPID, Update Informasi dan Dokumentasi	KMA 1-144 Tahun 2011, SK Dirjen Badilag No 0017 Tahun 2011	0 5 10

6	Terdapat Prosedur/Mekanisme Pengelolaan Informasi	SOP Pemberian Informasi, Bukti Pemberian Informasi	KMA 1-144 Tahun 2011, SK Dirjen Badilag No 0017 Tahun 2011, SK Sekma 002 Tahun 2012	0 5 10
---	---	--	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.12. Pengelolaan Perpustakaan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur/Mekanisme Pengelolaan Perpustakaan	SOP Pengelolaan Perpustakaan	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Petugas Perpustakaan	SK Ketua PA	KMA 143 Tahun 2007, PP No. 24 Tahun 2014 Pasal 36-Pasal 38	0 5 10
3	Terdapat Pengelolaan Administrasi Perpustakaan	Register Induk Buku Perpustakaan, Katalog/E-Katalog, Kartu Peminjaman, Kodefikasi dan Pelebelan Koleksi Buku Perpustakaan, Tata Tertib, Kartu Anggota	KMA 143 Tahun 2007, UU. No. 43 Tahun 2007 Pasal 18-19	0 5 10
4	Terdapat Bukti Keahlian Petugas Perpustakaan	Sertifikat/Piagam Pelatihan Profesi Kepustakaan/Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	KMA 143 Tahun 2007, UU. No. 43 Tahun 2007 Pasal 27, PP No. 24 Tahun 2014 Pasal 31-Pasal 35	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.13. Pelaksanaan Anggaran				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur/Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Anggaran	SOP Pencairan dan SOP Pertanggungjawaban	PMK No 190 Tahun 2012, Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Pengelola Anggaran yang Memiliki Kompetensi dan Tidak Rangkap Jabatan	SK Kuasa Pengguna Anggaran oleh Pengguna Anggaran, SK Bendahara oleh	PMK No 190 Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 11, Pasal 22	0 5 10

		Kepala satker, SK PPK dan Staf Pengelola oleh KPA (BP, PPK dan Pejabat Pengadaan/Pokja ULP Bersertifikat)		
3	Terdapat Rencana Penarikan Anggaran	Jadwal Penarikan Anggaran	PMK No 190 Tahun 2012 Pasal 13	0 5 10
4	Terdapat Pengumuman Informasi Pengadaan pada Aplikasi SIRUP	Bukti Input Data melalui Aplikasi SIRUP	Perpres No 54 Tahun 2010, Surat Sekretaris No 362 Tahun 2016, Perka LKPP No 13 Tahun 2012	0 5 10
5	Terdapat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan Ketentuan	LPJ Bendahara Pengeluaran (Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Lain-lain, Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Uang Muka, Buku Pembantu UP, Daftar Rincian Kas, LPJ, Saldo Rekening), Ceklist Kelengkapan Dokumen	Lampiran Persekma No 02 Tahun 2013, PMK No 190 Tahun 2012	0 5 10
6	Terdapat Laporan Realisasi Output Kegiatan	Laporan E-MONEV DJA	PMK No 249 Tahun 2011 Pasal 19	0 5 10
7	PPSPM Bertanggung Jawab Untuk Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Dokumen	Dokumen Pertanggungjawaban	PMK No 190 Tahun 2012 Pasal 17	0 5 10
8	Terdapat Transparansi Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran Yang Dipublikasikan di Website PA Maupun Media Lainnya Secara Berkala	Dokumen Transparansi, Media Komunikasi	SK 1-144 Tahun 2011	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 2.14. Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur/Mekanisme Penatausahaan PNBP	SOP Penatausahaan PNBP	UU No 20 Tahun 1997, PP No 53 Tahun 2008, PP No 1 Tahun 2004, PMK No 162 Tahun 2013, Perdirjen No 3 Tahun 2014, Surat Edaran Sekma No 21B/SEK/KU.04.2/01/2017, Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Petugas Penatausahaan PNBP	SK Bendahara Penerima	PP No 45 Tahun 2013 Pasal 18, PMK No 162 Tahun 2013 Pasal 6	0 5 10
3	Terdapat Pemungutan PNPB Sesuai Ketentuan	Bukti Tanda Terima	PP No 45 Tahun 2013 Pasal 40, PMK No 162 Tahun 2013 Pasal 16	0 5 10
4	Terdapat PNBP yang Disetorkan ke Kas Negara Tepat Waktu	Bukti Setor PNBP	PP No 45 Tahun 2013 Pasal 41, PMK No 162 Tahun 2013 Pasal 16	0 5 10
5	Terdapat Pelaporan PNBP Sesuai Ketentuan	LPJ Bendahara (BAP Kas Rekonsiliasi, BKU, BP Kas, BP PNBP, LPJ) dan Laporan PNBP	PP No 45 Tahun 2013 Pasal 52, PMK No 162 Tahun 2013 Pasal 16, Perdirjen No 3 Tahun 2014 Pasal 10	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 2.15. Penyusunan Laporan Keuangan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur /Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Tim Penyusun Laporan Keuangan	SK Tim Penyusun Laporan Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran	PMK No 222 Tahun 2016 Pasal 4, Perdirjen Perbendaharaan No 42 Tahun 2014 Pasal 4, KMA No. 143 Tahun 2007	0 5 10
3	Terdapat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan (waktu	Laporan keuangan	PMK No 177 Tahun 2015 pasal 2 dan 3, Perdirjen Perbendaharaan No 42 tahun	0 5 10

	penyampaian dan dokumen kelengkapannya)		2014 Pasal 9, KMA No. 143 tahun 2007	
--	---	--	--------------------------------------	--

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.16. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur /Mekanisme Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Keterlibatan Semua Unsur Pimpinan dalam Penyusunan Rencana Kerja Lima Tahunan	Daftar Hadir dan Notulen Rapat Pembahasan	Perpres No 29 Tahun 2014 Pasal 6	0 5 10
3	Terdapat Rencana Kerja Lima Tahunan	Dokumen Renstra	Perpres No 29 Tahun 2014 Pasal 6	0 5 10
4	Terdapat Keterlibatan Semua Unsur Unit Kerja dan Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Daftar Hadir dan Notulen Rapat Pembahasan	PP No 90 Tahun 2010 Pasal 4, PMK No 143 Tahun 2015 Pasal 2, Pasal 7	0 5 10
5	Terdapat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang Memuat Indikator Kinerja, Volume dan Harga Satuan	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	PP No 90 Tahun 2010 Pasal 6, PMK No 143 Tahun 2015 Pasal 3	0 5 10
6	Terdapat Keterlibatan Pimpinan dalam Setiap Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran	Daftar Hadir dan Notulen Rapat Pembahasan, Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran	PP No 90 Tahun 2010 Pasal 15, PMK No 143 Tahun 2015	0 5 10
7	Terdapat Sosialisasi dan Pembahasan Penggunaan Anggaran	Daftar Hadir, Notulen, Dokumen Rencana Kegiatan	PP No 90 Tahun 2010, PMK No 143 Tahun 2015	0 5 10
8	Terdapat Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN	RK-BMN	PMK No 150 Tahun 2014 Pasal 7, KMK No 450 Tahun 2014	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.17. Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKjIP)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur /mekanisme Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT dan LKjIP)	SOP Penyusunan SAKIP	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Pembahasan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Daftar Hadir, Notulensi, Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perpres No 29 Tahun 2014 Pasal 10, Permenpan No 12 Tahun 2015, Kepsekma No 20A/SEK/SK/IV/2016	0 5 10
3	Terdapat Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	SK Tim Renstra	Perpres No 29 Tahun 2014 Pasal 6, Permenpan No 12 Tahun 2015, Kepsekma No 20A/SEK/SK/IV/2016	0 5 10
4	Terdapat Mekanisme Penentuan Masalah Internal dan Eksternal (Internal Issue dan Eksternal Issue)	Hasil Identifikasi Masalah Internal dan Eksternal Organisasi (Analisis SWOT)	Perpres No 29 Tahun 2014, Permenpan No 12 Tahun 2015. Kepsekma No 20A/SEK/SK/IV/2016	0 5 10
5	Terdapat Pembahasan Penetapan Rencana Strategis (Renstra)	Daftar Hadir, Notulen, Dokumen Renstra	Perpres 29 tahun 2014 Pasal 6, PMK No 136 Tahun 2014	0 5 10
6	Terdapat Rencana Kinerja Tahunan	Dokumen RKT	Perpres 29 Tahun 2014, PMK no 136 Tahun 2014	0 5 10
7	Terdapat Penetapan Perjanjian Kinerja Mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 8-14, PMK No 136 Tahun 2014	0 5 10
8	Terdapat Pengukuran Kinerja Secara Periodik Menggunakan Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja dan Sasaran (Target) Kinerja	Pengukuran Kinerja	Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 15-16, PMK No 136 Tahun 2014	0 5 10
9	Terdapat Pelaksanaan Pengelolaan Data Kinerja	Hasil Pengelolaan Data Kinerja	Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 17, PMK No 136 Tahun 2014	0 5 10
10	Terdapat Kegiatan Penyusunan Pelaporan Kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 18-27, PMK No 136 Tahun 2014, Permenpan No. 53 Tahun 2014	0 5 10
11	Terdapat Tim Pelaksana Review	SK Tim Review	Perpres 29 Tahun 2014, PMK No 136 Tahun 2014, Permenpan No. 53 Tahun	0 5 10

			2014, Kepsekma No 20A Tahun 2016	
12	Terdapat Kegiatan Review Terhadap Dokumen SAKIP	Hasil Review Dokumen SAKIP, Notulen, Daftar Hadir	Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 28-29, PMK No 136 Tahun 2014, Permenpan No. 53 Tahun 2014	0 5 10
13	Terdapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP oleh Tingkat Banding	Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	Kepsekma No 20A Tahun 2016	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.18. Penyusunan Laporan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur /Mekanisme Penyusunan Laporan	SOP Penyusunan Laporan	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Secara Periodik	Laporan E-Monev Terupdate	PP No 39 Tahun 2006 Pasal 9, KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
3	Terdapat Tim Penyusun Laporan Tahunan	SK Ketua PA	Permenpan no 80 Tahun 2012, KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
4	Terdapat Laporan Tahunan yang Sesuai dengan Ketentuan	Dokumen Laporan Tahunan	Permenpan No 80 Tahun 2012, KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
5	Terdapat Penyampaian Laporan Tahunan yang Tepat Waktu	Bukti Pengiriman	Permenpan no 80 Tahun 2012, KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
6	Terdapat Laporan Tahunan yang Dipublikasikan di Website	Conten Menu pada Web	KMA No 1-144 Tahun 2011, SE Dirjen Badilag No 4975-A/DjA/OT.00/IX/2009	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.19. Pengelolaan Teknologi Informasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur/ Mekanisme Pengelolaan TI	SOP Pengelolaan TI	KMA 143 Tahun 2007, UU 11 Tahun 2008 Pasal 4, Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10

2	Terdapat Petugas Pengelola TI	SK Ketua PA	SK KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
3	Terdapat Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan	Rencana Pengembangan Teknologi dalam Pemberian Pelayanan	UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008	0 5 10
4	Terdapat Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5-12, UU No 14 Tahun 2008 Pasal 9,	0 5 10
5	Terdapat Penerapan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan Publik	Pelaksanaan Penerapan TI dalam Pemberian Pelayanan Publik	UU No 11 Tahun 2008 Pasal 17-22, UU No 14 Tahun 2008,	0 5 10
6	Terdapat Tim Pengelola Website yang Kompeten	SK Tim Pengelola Website	SK KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
7	Terdapat Pengelolaan Komunikasi Publik	Kelengkapan Content dan Updating Website	SK KMA 1-144 Tahun 2011, SE Dirjen Badilag No 4975-A/DjA/OT.00/IX/2009	0 5 10

BAB III. Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.1. Pelayanan Informasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Mekanisme/Prosedur Pemberian Layanan Informasi	1. SOP Layanan Informasi berbasis TI 2. Bagan Layanan Informasi Permohonan Informasi berbasis TI	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Penunjukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	SK Ketua Pengadilan Agama Tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 2. PP Nomor 61 Tahun 2010	0 5 10
3	Adanya Penetapan Jenis dan Standar Layanan Informasi	1. SK Ketua Tentang Jenis Informasi di Pengadilan 2. SK Ketua Pengadilan Agama Tentang Standar Layanan Informasi	1. PP Nomor 61 Tahun 2010 2. KMA 1-144 Tahun 2011 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013	0 5 10
4	Adanya Persyaratan Permohonan Informasi	Formulir permohonan informasi	1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 2. KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
5	Adanya Persyaratan Permohonan Pengajuan Keberatan	1. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Pelayanan Informasi 2. Register Keberatan Permohonan Informasi 3. Surat Tanggapan Keberatan Atas Pelayanan Informasi	KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
6	Adanya Pencatatan Atas Keberatan Pelayanan Informasi	Register Keberatan Permohonan Informasi	KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10

7	Adanya Tanggapan Atas Keberatan	Surat Tanggapan Keberatan Atas Pelayanan Informasi	KMA 1-144 Tahun 2011	
8	Adanya Pelaporan Kegiatan Permohonan Informasi	1. Laporan dari petugas informasi kepada pimpinan PA 2. Laporan dari PA ke PTA 3. Laporan Layanan Informasi di Laporan Tahunan PA	1. KMA 1-144 tahun 2011 2. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011	0 5 10
9	Adanya Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi	Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi	SK Ketua PTA tentang Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Mekanisme/Prosedur Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum	SOP Layanan Pos Bantuan Hukum Bagan Layanan Pos Bantua Hukum	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 4. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	0 5 10
2	Adanya Penetapan Ruang dan Sarana/Prasarana Pos Bantuan Hukum	SK Ketua Pengadilan Tentang Penggunaan Ruang dan Perlengkapan Pos Bantuan Hukum	1. Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan	0 5 10

			Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 3. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	
3	Adanya Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum	SK Ketua PA Tentang Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum	1. Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 3. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	0 5 10
4	Adanya Penetapan Spesifikasi Jenis Layanan Bantuan Hukum	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)	1. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan Aturan Perubahannya 2. Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 3. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 4. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	0 5 10
5	Adanya Pencatatan Pelayanan Bantuan Hukum	Register Layanan Bantuan Hukum	1. Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman	0 5

			Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 3. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	10
6	Adanya Pelaporan Pelayanan Bantuan Hukum	1. Laporan Bulanan Penyedia Jasa Kepada PA 2. Laporan Bulanan Dari PA Kepada : – PTA – DITJEN BADILAG	1. Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 3. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	0 5 10
7	Adanya Evaluasi Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum oleh Pemberi Layanan Hukum	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Pengadilan Agama	1. Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	

			3. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	
--	--	--	---	--

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.3. Pelayanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Mekanisme/Prosedur Pemberian Layanan sidang di luar gedung	SOP Layanan Sidang di Luar Gedung	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Penetapan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Keputusan Ketua PA Tentang Penetapan Lokasi Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
3	Adanya Verifikasi Perkara Yang Akan Di sidang Diluar Gedung Pengadilan	1. Daftar Perkara Yang Akan Disidang 2. Register Perkara	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
4	Adanya Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	1. SK Tim 2. Surat Tugas 3. Jadwal Persidangan	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
5	Adanya Pelaporan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	1. Rekapitulasi Data Perkara 2. Laporan Kepada PTA dan Badilag	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.4. Pelayanan Penerimaan Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Mekanisme/Prosedur Penerimaan Perkara	1. SOP Mekanisme atau prosedur Penerimaan Perkara 2. SOP tentang Prosedur Pembayaran Panjar biaya perkara 3. Bagan prosedur penerimaan perkara	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Penunjukan Petugas/Tim Penerimaan Perkara	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Penunjukan Petugas (Kasir, Pendaftaran, Register)	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya Penetapan Besaran Panjar Biaya Perkara	SK Ketua Pengadilan tentang panjar biaya perkara	Buku II	0 5 10
4	Adanya taksiran panjar biaya perkara	1. SKUM Sementara 2. Taksiran Panjar Biaya Perkara	1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian pada Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 2. Buku II 3. SEMA No. 4 Tahun 2008	0 5 10
5	Adanya Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Perkara	1. Surat Gugatan/Permohonan 2. Slip setoran panjar biaya perkara untuk distorkan ke Bank	SK Ketua Pengadilan Agama Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara	0 5 10
6	Adanya Pencatatan Perkara Input SIPP	1. SKUM Lunas 2. Register Perkara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.5. Pelayanan Sidang Terpadu			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan Skor
1	Adanya Mekanisme/Prosedur Pemberian Layanan sidang terpadu	SOP Layanan Sidang terpadu	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 0 5 10
2	Adanya Identifikasi Potensi Pelaksanaan Sidang terpadu	Keputusan Ketua Pengadilan Agama Untuk Melaksanakan Sidang terpadu	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 0 5 10
3	Adanya Yang Mengajukan Perkara di Lokasi Yang Telah Ditetapkan Sidang terpadu	Keputusan Ketua Pengadilan Agama Untuk Melaksanakan Sidang Di Lokasi Yang Telah Ditetapkan	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 0 5 10
4	Adanya Pelaksanaan Sidang terpadu	Surat Tugas Untuk Melaksanakan Sidang terpadu	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 0 5 10
5	Adanya Pelaporan Sidang terpadu	Laporan Sidang terpadu	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.6. Penetapan Majelis Hakim (PMH)			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan Skor
1	Adanya Prosedur Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	SOP tentang Prosedur Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 0 5 10

			3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya Majelis Hakim Yang Ditetapkan Input SIPP	Penetapan Majelis Hakim.	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 1971 4. Pasal 93 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	0 5 10
3	Adanya Pencetakan PMH Melalui SIPP Untuk Petugas Register	Instrumen PMH	1. Pola BINDALMI 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.7. Penugasan Panitera Pengganti				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Penugasan Panitera Pengganti	SOP tentang Prosedur Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Panitera Pengganti Yang Ditetapkan Input SIPP	Penugasan Panitera Pengganti	1. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya Pencetakan Penugasan Panitera Pengganti Melalui SIPP	Instrumen Penugasan PP	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.8. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	SOP tentang Prosedur Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Jurusita Yang Ditetapkan	Penugasan Jurusita	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya Pencetakan Penugasan Jurusita Melalui SIPP	Instrumen Penugasan Jurusita	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.9. Penetapan Hari Sidang			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan Skor
1	Adanya Prosedur Penetapan Hari Sidang	SOP tentang Prosedur Penetapan Hari Sidang	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 0 5 10
2	Adanya Kelengkapan Berkas Perkara Untuk Disidangkan	Berkas Perkara	Pola Bindalmin

3	Adanya Catatan Ketua Majelis Terhadap Berkas Perkara Yang Ditangani	Buku Agenda Penanganan Perkara	Pola Bindalmin	0 5 10
4	Adanya Rencana Persidangan Perkara Oleh Ketua Majelis	Jadwal Sidang	Pola Bindalmin	0 5 10
5	Adanya Hari Sidang Yang Ditetapkan Oleh Ketua Majelis Input SIPP	1. Instrumen Penetapan Hari Sidang 2. Penetapan Hari Sidang	1. Pasal 121 dan 122 HIR/ 145 dan 146 R. Bg 2. Pasal 26 dan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.10. Pemanggilan Para Pihak				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pemanggilan Para Pihak	SOP tentang Prosedur Pemanggilan para pihak	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Perintah Memanggil Dari Majelis Kepada JSP	Instrumen Perintah Memanggil	Pola Bindalmin	0 5 10
3	Adanya Daftar para pihak yang Akan dipanggil	Buku Agenda Pemanggilan	Pola Bindalmin	0 5 10
4	Adanya Permintaan Biaya Transport Pemanggilan	1. Instrumen Permintaan Biaya Pemanggilan 2. Bukti Penyerahan Uang	Pola Bindalmin	
5	Adanya Penyerahan Surat Panggilan Sidang	Relaas Panggilan	1. Pola Bindalmin 2. Pasal 200 RO	

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.11. Pelayanan Pemanggilan Tergugat / Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur pemanggilan Tergugat / Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya untuk perkara cerai	SOP Panggilan Tergugat / Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya untuk perkara cerai	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Buku II 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Media Massa yang ditetapkan pengadilan	SK Ketua Pengadilan Agama tentang penunjukan media massa untuk mengumumkan panggilan	1. PP 9/1975 Pasal 27 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya pembayaran dari Pengadilan Agama kepada media massa	Kuitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib	1. PP 9/1975 Pasal 27 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya pengumuman panggilan sidang melalui mass media dan papan pengumuman di Pengadilan	1. Surat Pengantar permintaan pengumuman di mass media 2. Relas yang ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama	1. PP 9/1975 Pasal 27 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya pencatatan secara khusus penyampaian panggilan yang tidak diketahui tempat tinggalnya	Buku kendali penyampaian panggilan secara Ghoib	1. PP 9/1975 Pasal 27 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.12. Pelayanan Pemanggilan Tergugat / Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosdur pemanggilan Tergugat / Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya untuk perkara non cerai	SOP Panggilan Tergugat / Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya untuk perkara non cerai	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Buku II 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya penyerahan surat panggilan sidang kepada bupati/walikota	Tanda terima dari bupati/walikota	1. Pasal 390 ayat (3) - HIR /Pasal 718 ayat (3) RBg 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya pemanggilan yang disampaikan melalui bupati/walikota	Relaas	1. Pasal 390 ayat (3) - HIR /Pasal 718 ayat (3) RBg 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya pegumuman pemanggilan melalui bupati/walikota dan Papan Pengumuman di Pengadilan	Surat Pengantar Permintaan Pengumuman dan Relaas pemanggilan yang sudah diumumkan	1. Pasal 390 ayat (3) - HIR /Pasal 718 ayat (3) RBg 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.13. Pelayanan Pemanggilan Tergugat / Termohon Yang Berada Diluar Negeri				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosdur pemanggilan Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri	SOP Panggilan Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri	1. UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (3) 2. Buku II 3. SK KMA Nomor 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991	0 5 10

			4. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 5. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya biaya pengiriman panggilan Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri	Tanda terima dari kasir kepada JSP	1. UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (3) 2. Buku II 3. SK KMA Nomor 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991	0 5 10
3	Adanya pengiriman panggilan melalui Kemenlu c.q. Dirjen Protokoler dan Konsuler dengan tembusan Kedubes RI yang bersangkutan	1. Surat Ketua Pengadilan Agama 2. Ressi pengiriman	1. UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (3) 2. Buku II 3. SK KMA Nomor 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991	0 5 10
4	Adanya surat jawaban sidang dari Kemenlu	Surat panggilan / pemberitahuan dari Kemenlu	1. UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (3) 2. Buku II 3. SK KMA Nomor 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991	0 5 10
5	Adanya pencatatan secara khusus penyampaian panggilan Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri	Buku kendali penyampaian panggilan Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri	1. PP 9/1975 Pasal 27 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.14. Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain	SOP tentang Prosedur Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DiA/Hm.25/SK/III/20	0 5 10

			14 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya penunjukan koordinator panggilan delegasi	SK Ketua Pengadilan Agama tentang penunjukan Koordinator panggilan delegasi	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 3. Pasal 5 RV	0 5 10
3	Adanya permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan pihak berperkara yang berada di wilayah Pengadilan Agama lain Input SIPP	Surat permintaan bantuan panggilan di SIPP	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 3. Pasal 5 RV	0 5 10
4	Adanya pengiriman biaya panggilan	Bukti pengiriman (Resi, Slip Setoran BANK)	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	0 5 10
5	Adanya penerimaan Relaas dari PA yang dimintai bantuan	1. Surat pengantar di SIPP 2. Relaas	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 3. Pasal 5 RV	0 5 10
6	Adanya pencatatan permintaan bantuan panggilan input SIPP	Register bantuan panggilan di SIPP	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 3. Pasal 5 RV	0 5 10
7	Adanya laporan bulanan pengelolaan panggilan delegasi	Data Laporan panggilan delegasi kepada : 1. Ketua Pengadilan Agama 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag	Analog kepada Angka 5 SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.15. Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain	SOP tentang Prosedur Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya penunjukan koordinator panggilan delegasi	SK Ketua Pengadilan Agama tentang penunjukan Koordinator panggilan delegasi	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 3. Pasal 5 RV	0 5 10
3	Adanya permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan pihak berperkara yang berada di wilayah Pengadilan Agama lain Input SIPP	Surat permintaan bantuan panggilan di SIPP	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 3. Pasal 5 RV	0 5 10
4	Adanya penerimaan biaya panggilan dari PA lain	Bukti pengiriman (Resi, Slip Setoran BANK)	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	0 5 10
5	Adanya penerimaan Relaas dari PA yang dimintai bantuan	3. Surat pengantar di SIPP 4. Relaas	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 3. Pasal 5 RV	0 5 10
6	Adanya pencatatan permintaan bantuan panggilan input SIPP	Register bantuan panggilan di SIPP	1. Buku II 2. Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	0 5 10

			3. Pasal 5 RV	
7	Adanya laporan bulanan pengelolaan panggilan delegasi	Data Laporan panggilan delegasi kepada : 3. Ketua Pengadilan Agama 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag	Analog kepada Angka 5 SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.16. Kegiatan Persidangan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Kegiatan Persidangan	SOP tentang Prosedur Kegiatan Persidangan	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya pendaftaran antrian sidang	Daftar antrian sidang	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. SK Ketua Pengadilan tentang Pemakaian Antrian Sidang	
3	Adanya Persiapan Persidangan	1. Daftar Perkara yang akan disidangkan 2. Kelengkapan berkas perkara 3. Check List peralatan persidangan (Jaringan Internet, Komputer, Palu, Instrumen, Almanak, Lampu penerangan, Sound sistem, dll) 4. Check dekorum persidangan(Laken, Bendera, dll)	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. SK Ketua Pengadilan tentang Pemakaian Antrian Sidang	0 5 10

4	Adanya catatan persidangan	Berita Acara Sidang (BAS) di SIPP dan Hard Copy	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya penundaan sidang karena pihak tidak hadir	1. Instrumen Perintah Memanggil 2. Relas panggilan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.17. Pelayanan Mediasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Mediasi	SOP tentang Prosedur Pelayanan Mediasi	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Informasi Mediator di Pengadilan Agama/MSy	Daftar Mediator	1. Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 2. KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
3	Adanya proses pemanggilan para pihak	Relaas Panggilan	1. Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 2. KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
4	Adanya pendaftaran para pihak yang akan di mediasi	Daftar antrian para pihak yang akan dimediasi	1. Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 2. KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
5	Adanya penjelasan kepada para pihak tentang tata cara pelaksanaan mediasi	Pernyataan para pihak bahwa telah memahami proses mediasi	1. Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 2. KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
6	Adanya proses pemilihan mediator oleh para pihak/Majelis	SK Ketua PA tentang penetapan Mediator	1. Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 2. KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
7	Adanya pencatatan pelaksanaan mediasi	1. Buku register mediasi 2. Berita Acara Mediasi	1. Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 2. KMA 108 Tahun 2016	0 5 10

8	Adanya Laporan hasil pelaksanaan Mediasi	1. laporan mediator kepada Ketua Majelis 2. Laporan bulanan pelaksanaan mediasi kepada : – Pengadilan Tingkat Banding – Ditjen Badilag	1. Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 2. KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
---	--	---	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.18. Pelayanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Layanan Pemanggilan Saksi	SOP tentang Prosedur Layanan Pemanggilan Saksi	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Perintah Majelis untuk Pemanggilan Saksi	Instrumen Perintah Panggil Saksi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya perintah pembebanan biaya untuk pemanggilan saksi	Instrumen tambah panjar	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya pelaksanaan pemanggilan saksi	Relaas Panggilan	Pasal 140 HIR/Pasal 166 R.Bg	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.19. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan	SOP tentang Prosedur Layanan Pelayanan Mohon Bantuan	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012	0 5 10

	Saksi ke Pengadilan Agama Lain	Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya permintaan pemeriksaan saksi di luar wilayah hukum	Surat permintaan bantuan pemeriksaan saksi	Pasal 143 ayat (1) HIR/ Pasal 170 ayat (3) R. Bg	0 5 10
3	Adanya pengiriman biaya mohon bantuan pemeriksaan saksi di luar wilayah hukum	Bukti pengiriman biaya	Pasal 143 ayat (2) HIR/ Pasal 170 ayat (4) R. Bg	0 5 10
4	Adanya pencatatan mohon bantuan pemeriksaan saksi di luar wilayah hukum	Register mohon bantuan pemeriksaan saksi	Pasal 143 ayat (2) HIR/ Pasal 170 ayat (4) R. Bg	0 5 10
5	Adanya penerimaan hasil pelaksanaan pemeriksaan saksi	1. Surat pengantar 2. Berita acara sidang	Pasal 143 ayat (2) HIR/ Pasal 170 ayat (4) R. Bg	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.20. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain	SOP tentang Prosedur Layanan Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya penerimaan permintaan bantuan pemeriksaan saksi dari luar wilayah hukum	Surat permintaan bantuan pemeriksaan saksi	Pasal 143 ayat (1) HIR/ Pasal 170 ayat (3) R. Bg	0 5 10
3	Adanya penerimaan biaya mohon bantuan	Bukti penerimaan biaya	Pasal 143 ayat (2) HIR/ Pasal 170 ayat (4) R. Bg	0 5 10

	pemeriksaan saksi dari luar wilayah hukum			
4	Adanya pencatatan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari luar wilayah hukum	Register mohon bantuan pemeriksaan saksi	Pasal 143 ayat (2) HIR/ Pasal 170 ayat (4) R. Bg	0 5 10
5	Adanya penerimaan hasil pelaksanaan pemeriksaan saksi	1. Surat pengantar 2. Berita acara sidang	Pasal 143 ayat (2) HIR/ Pasal 170 ayat (4) R. Bg	0 5 10
6	Adanya perintah pemanggilan saksi	1. Instrumen perintah panggil 2. Relas panggilan	SK Ketua Pengadilan Agama tentang penerimaan bukti setiap penyerahan dokumen di persidangan	0 5 10
7	Adanya pengiriman hasil pemeriksaan saksi	1. Surat pengantar 2. Berita Acara Sidang	Pasal 143 ayat (2) HIR/Pasal 170 ayat (5) R. Bg	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.21. Pelayanan Pemeriksaan Setempat				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Pelayanan Pemeriksaan Setempat	SOP tentang Prosedur Layanan Pelayanan Pemeriksaan Setempat	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya standar komponen biaya pemeriksaan setempat	SK Ketua PA tentang standar komponen biaya pemeriksaan setempat	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
3	Adanya taksiran biaya pemeriksaan setempat	Rincian biaya	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
4	Adanya perintah tambah panjar biaya perkara	Instrumen perintah tambah panjar	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
5	Adanya pelunasan pembayaran tambah panjar	1. SKUM 2. Slip setoran BANK	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10

6	Adanya alasan/dasar untuk melakukan pemeriksaan setempat	Berita Acara Sidang	1. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 2. Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) HIR/Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R. Bg	0 5 10
7	Adanya hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat	Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat	SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.22. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama lain	SOP tentang Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama lain	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya standar komponen biaya pemeriksaan setempat	SK Ketua PA tentang standar komponen biaya pemeriksaan setempat	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
3	Adanya penerimaan biaya mohon bantuan pemeriksaan setempat	Bukti penerimaan biaya	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
4	Adanya penetapan Hakim Komisaris untuk melaksanakan pemeriksaan setempat	Penetapan hakim komisaris	1. Pasal 180 ayat (3) R. Bg 2. SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10
5	Adanya penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan setempat	Jadwal pelaksanaan pemeriksaan setempat	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
6	Adanya pelaksanaan pemeriksaan setempat	Berita acara pemeriksaan setempat	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
7	Adanya laporan majelis kepada Ketua atas pelaksanaan pemeriksaan setempat	Naskah Laporan	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
8	Adanya pengiriman hasil pemeriksaan setempat	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10

		3. Berita Acara Pemeriksaan		
--	--	-----------------------------	--	--

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.23. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama lain	SOP tentang Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama lain	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya standar komponen biaya pemeriksaan setempat	SK Ketua PA tentang standar komponen biaya pemeriksaan setempat	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
3	Adanya penerimaan biaya mohon bantuan pemeriksaan setempat	Bukti penerimaan biaya	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
4	Adanya penetapan Hakim Komisaris untuk melaksanakan pemeriksaan setempat	Penetapan hakim komisaris	1. Pasal 180 ayat (3) R. Bg 2. SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10
5	Adanya penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan setempat	Jadwal pelaksanaan pemeriksaan setempat	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
6	Adanya pelaksanaan pemeriksaan setempat	Berita acara pemeriksaan setempat	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
7	Adanya laporan majelis kepada Ketua atas pelaksanaan pemeriksaan setempat	Naskah Laporan	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10
8	Adanya pengiriman hasil pemeriksaan setempat	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman 3. Berita Acara Pemeriksaan	1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 2. BUKU II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.24. Pelayanan Tambah Biaya Panjar Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Tambah Biaya Panjar	SOP tentang Prosedur Pelayanan Tambah Biaya Panjar	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Catatan Kekurangan Biaya Panjar Perkara	Buku jurnal keuangan perkara	1. SEMA Nomor 3 Tahun 1967 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya Pemberitahuan dan Perintah Untuk Tambah Panjar Biaya Perkara	1. Surat pemberitahuan dari Panitera untuk menambah biaya perkara 2. Taksiran tambah panjar 3. Jurnal keuangan perkara	1. SEMA Nomor 3 Tahun 1967 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya pembayaran tambahan panjar biaya perkara	1. Slip BANK pembayaran tambah panjar 2. SKUM	1. Buku II 2. SEMA Nomor 4 Tahun 2008	0 5 10
5	Adanya teguran kepada pihak yang belum membayar tambahan panjar	1. Surat pemberitahuan dari Panitera untuk menambah biaya perkara 2. Taksiran tambah panjar 3. Jurnal keuangan perkara	1. Buku II 2. SEMA Nomor 4 Tahun 2008	0 5 10
6	Adanya keterangan Panitera tentang penambahan panjar biaya	1. Surat keterangan telah membayar 2. Surat keterangan tidak membayar	1. Buku II 2. SEMA Nomor 4 Tahun 2008	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	
			20% – 79% terpenuhi sebagian	
			<20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.25. Pelayanan Permohonan Sita Jaminan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Sita Jaminan	SOP tentang Prosedur Pelayanan Sita Jaminan	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya Permohonan Sita Jaminan Dalam Gugatan	Berkas permohonan sita	Pasal 226 dan 227 HIR/Pasal 260 dan 261 R.Bg	0 5 10
3	Adanya pemeriksaan gugatan permohonan sita untuk dikabulkan/menolak/pena ngguhan	1. Penetapan mengabulkan permohonan sita 2. Penetapan hari sidang dan menolak permohonan sita 3. Putusan sela penangguhan permohonan sita, Berita Acara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya penetapan komponen biaya sita jaminan	Taksiran biaya sita jaminan pada SKUM sementara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya Pembayaran Panjar Biaya Sita Jaminan	1. Slip setoran BANK 2. SKUM	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
6	Adanya Pencatatan Sita Jaminan	Buku Register Sita Jaminan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan pelaksanaan sita	Relaas	3. Pola Bindalmin 4. Buku II	0 5 10
8	Adanya Pelaksanaan Sita Jaminan	<u>Berita Acara Sita Jaminan</u>	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
9	Adanya penyerahan salinan berita acara kepada para pihak	Bukti tanda terima penyerahan salinan berita acara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
10	Adanya pencatatan sita pada BPN (sudah sertifikat) atau Kepala Desa	Bukti penyampaian berita acara sita pada BPN atau Kepala Desa	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.26. Pelayanan Sita Buntut				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Sita Buntut	SOP tentang Prosedur Pelayanan Sita Buntut	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya Permohonan Sita Jaminan Setelah Perkara Putus	Berkas permohonan sita jaminan	Pasal 226 dan 227 HIR/ Pasal 260 dan 261 R.Bg	0 5 10
3	Adanya penetapan komponen biaya sita jaminan	Taksiran biaya sita jaminan pada SKUM sementara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya Pembayaran Panjar Biaya Sita Jaminan	1. Slip setoran BANK 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Lunas	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya Pendaftaran Permohonan Sita	Register sita jaminan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
6	Adanya pengiriman berkas permohonan sita dari PA pengaju kepada PTA	Surat pengantar pengiriman berkas permohonan sita kepada PTA	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
7	Adanya penetapan dari PTA yang mengabulkan permohonan sita jaminan	Putusan sela PTA	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
8	Adanya perintah Ketua PA untuk pelaksanaan sita jaminan	Penetapan pelaksanaan sita jaminan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
9	Adanya JS/ JSP yang ditunjuk	Penunjukan JS/JSP	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
10	Adanya pemberitahuan pelaksanaan sita kepada para pihak dan instansi terkait	Relas pemberitahuan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
11	Adanya pelaksanaan sita	Berita Acara Sita Jaminan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
12	Adanya penyampaian berita acara sita kepada para pihak	1. Bukti Penyampaian Berita Acara Sita kepada para pihak 2. Surat Permintaan Pendaftaran Sita Jaminan ke instansi terkait (BPN/Kepolisian)	Pasal 195 ayat (5) HIR / Pasal 206 ayat (5) RBg	0 5 10

13	Adanya pengiriman berita acara sita kepada PTA	Bukti pengiriman berita acara sita ke PTA	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	
----	--	---	---------------------------------	--

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.27. Pelayanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Sita harta bersama	SOP tentang Prosedur Pelayanan Sita harta bersama	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya Permohonan Sita harta bersama	Berkas permohonan sita	Pasal 226 dan 227 HIR/Pasal 260 dan 261 R.Bg	0 5 10
3	Adanya penetapan komponen biaya Sita harta bersama	Taksiran biaya sita harta bersama pada SKUM sementara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya Pembayaran Panjar Biaya Sita harta bersama	3. Slip setoran BANK 4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) lunas	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya Pencatatan Sita harta bersama	Buku Register Sita harta bersama	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
6	Adanya mejelis yang telah ditetapkan	Penetapan Majelis Hakim	1. Pasal 95 KHI 2. Buku II 3. KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10
7	Adanya Perintah Pemanggilan Sidang	Penetapan Hari Sidang	1. Pasal 95 KHI 2. Buku II 3. KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10
8	Adanya Pelaksanaan Pemanggilan Sidang	<u>Relaas Panggilan Sidang Sita Harta Bersama</u>	1. Pasal 95 KHI 2. Buku II 3. KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10
9	Adanya Pelaksanaan Persidangan Pemeriksaan Sita Harta Bersama	Berita Acara Sidang Sita Harta Bersama	1. Pasal 95 KHI 2. Buku II 3. KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10
10	Adanya Hasil Persidangan Permohonan Sita Harta Bersama	Penetapan Pengadilan	1. Pasal 95 KHI 2. Buku II 3. KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	
			20% – 79% terpenuhi sebagian	
			<20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.28. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	SOP tentang Prosedur Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Data Pihak Yang Tidak Hadir Pada Saat Pengucapan Putusan	Daftar pihak yang tidak hadir saat pengucapan putusan (Meja III)	1. Pasal 124 dan 125 HIR 2. Pasal 148,149 dan 150 R.Bg	0 5 10
3	Adanya Perintah Pemberitahuan Isi Putusan	Instrumen Perintah Pemberitahuan Isi Putusan	1. Pasal 179 ayat (2) HIR/Pasal 190 ayat (2) R. Bg 2. Pola Bindalmin 3. Buku II	0 5 10
4	Adanya Pengeluaran Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	Tanda Terima Uang Pemberitahuan Isi Putusan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. SK Dirjen tetntang Buku Bantu dan BKU Keuangan Perkara	0 5 10
5	Adanya Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
6	Adanya Penyerahan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Ke Panitera Muda	Tanda terima penyerahan relaas (Buku Ekspedisi Jurusita)	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. PERMA 7 Tahun 2015	0 5 10
	Adanya Pencatatan Bahwa Isi Putusan Telah Diberitahukan	Buku Register Induk Perkara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. PERMA 7 Tahun 2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.29. Pelayanan Pengelolaan Uang Sisa Panjar				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pengelolaan Uang Sisa Panjar	SOP tentang Prosedur Pengelolaan Uang Sisa Panjar	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Data Perkara Yang Sudah Putus	Daftar Perkara Putus (melalui SIPP)	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya Rincian Penggunaan Panjar Biaya Perkara	Jurnal Keuangan Perkara (melalui SIPP)	SK Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara	0 5 10
4	Adanya Pemberitahuan Sisa Panjar Yang Harus Dikembalikan Kepada Pihak	Surat Pemberitahuan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya Sisa Panjar Yang Dikembalikan	Kuitansi Pengembalian Sisa Panjar	1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara 2. Surat Sekretaris MA RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 perihal Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara	0 5 10
6	Adanya Pencatatan Pengelolaan Sisa Panjar	Buku Bantu Pengembalian Sisa Panjar (Aplikasi Pendukung SIPP)	1. KMA No. 26 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Surat Edaran Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/111/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama	0 5 10
7	Adanya Sisa Panjar Yang Belum Diambil Lebih Dari 6 Bulan	Daftar Sisa Panjar Yang Belum Diambil (Aplikasi Pendukung SIPP)	1. KMA No. 26 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Surat Edaran Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/111/2015 Tentang Pedoman	0 5 10

			Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama	
8	Adanya Pencatatan Sisa Panjar Yang Lebih Dari 6 Bulan Pada Buku HHK Lainnya	Buku HHKL	1. KMA No. 26 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Buku II	0 5 10
9	Adanya Penyerahan Sisa Panjar Yang Lebih Dari 6 Bulan Kepada Bendahara Penerima	Kuitansi dan Daftar Rincian Uang	1. KMA No. 26 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Buku II	0 5 10
10	Adanya Sisa Panjar Yang Dikembalikan	Buku Sisa Panjar Yang Dikembalikan	1. KMA No. 26 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.30. Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	Prosedur Mutu Tentang Penyampaian Salinan Putusan	SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Perkara Yang Diputus	Daftar Perkara Putus (SIPP)	KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan	0 5 10
3	Adanya Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak	Bukti Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak	1. KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan 2. SK Ketua Pengadilan tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan	0 5 10
4	Adanya Pencatatan Pengendalian Penyampaian Salinan Putusan	Buku Kendali Penyampaian Salinan Putusan	KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.31. Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah	SOP tentang Prosedur Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 0 5 10
2	Adanya pemberitahuan rujuk dari Kantor Urusan Agama	Bukti terjadi rujuk antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon	Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah 0 5 10
3	Adanya permintaan Pengambilan Buku Kutipan Akta Nikah	Instrumen Pengembalian Buku Kutipan Akta Nikah	Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah 0 5 10
4	Adanya Penyerahan Kutipan Akta Nikah	Bukti Penyerahan kembali Buku Kutipan Akta Nikah	Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah 0 5 10
5	Adanya Pencatatan Pengendalian Buku Kutipan Akta Nikah	Register Pengendalian Buku Kutipan Akta Nikah	Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah 0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.32. Pelayanan Ikrar Talak			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Ikrar Talak	SOP tentang Prosedur Pelayanan Ikrar Talak	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 0 5 10

			September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya perkara Cerai Talak yang berkekuatan hukum tetap	Daftar perkara cerai talak di SIPP	Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	0 5 10
3	Adanya Majelis hakim yang ditetapkan di SIPP	PMH Ikrar talak	1. SOP Penyelesaian Perkara Badilag 2. Standarisasi Formulir Kepaniteraan	0 5 10
4	Adanya Panitera Pengganti Yang ditetapkan di SIPP	Penugasan panitera pengganti	1. SOP Penyelesaian Perkara Badilag 2. Standarisasi Formulir Kepaniteraan	0 5 10
5	Adanya JS/JSP yang ditetapkan di SIPP	Penugasan JS/JSP	1. SOP Penyelesaian Perkara Badilag 2. Standarisasi Formulir Kepaniteraan	0 5 10
6	Adanya Hari sidang ikrar talak yang ditetapkan	PHS ikrar talak	1. SOP Penyelesaian Perkara Badilag 2. Standarisasi Formulir Kepaniteraan	0 5 10
7	Adanya perintah pemanggilan sidang ikrar talak	Instrumen Perintah Pemanggilan	Pola bindalmin	0 5 10
8	Adanya pelaksanaan pemanggilan sidang ikrar talak	Relaas Panggilan Ikrar Talak	1. SOP Penyelesaian Perkara Badilag 2. Standarisasi Formulir Kepaniteraan	0 5 10
9	Adanya catatan pengendalian ikrar talak	Register kendali ikrar talak	Pola Bindalmin	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN		$\geq 80\%$ terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi		
Standar				
3.33. Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai	SOP tentang Prosedur Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang	0 5 10

			pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap	Daftar putusan dan berkas perkara	Pola Bindalmin Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989	0 5 10
3	Adanya pencetakan akta cerai melalui aplikasi SIPP	Akte Cerai	Pola Bindalmin Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989	0 5 10
4	Adanya Permintaan Akta Cerai Dari Pihak	Formulir Permohonan Permintaan Akta Cerai	Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989	0 5 10
5	Adanya penjelasan tarif biaya PNBPN pengambilan Akta Cerai	SK ketua Pengadilan Tingkat Pertama tentang tarif biaya PNBPN	PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya	0 5 10
6	Adanya Pembayaran PNBPN Akta Cerai	Bukti/Kuitansi Pembayaran PNBPN	1. Pasal 84 (4) UU No.7 Tahun 1989 2. KMA No. 26 Tahun 2012 3. KMA No. 032/SK/V/2006 tentang Buku II	0 5 10
7	Adanya penyerahan akta cerai	Bukti Penyerahan	Pola Bindalmin	0 5 10
8	Adanya pencatatan pengendalian akta cerai	Register akta cerai	Pola Bindalmin	0 5 10
9	Adanya pelaporan pengelolaan akta cerai	Data Laporan	Pola Bindalmin	0 5 10

DAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.34. Pelayanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan Ke KUA				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan Ke KUA	SOP tentang Prosedur Pelayanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan Ke KUA	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10

2	Adanya perkara cerai yang telah berkekuatan hukum tetap	Putusan yang telah BHT	1. KMA 026 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Buku II	0 5 10
3	Adanya pembuatan Petikan Salinan Putusan	Petikan Salinan Putusan	SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017	0 5 10
4	Adanya Pengiriman Petikan Salinan Putusan	Surat Pengantar Pengiriman Beserta Daftarnya	Pola Bindalmin	0 5 10
5	Adanya Pencatatan Pengendalian Petikan Salinan Putusan	Register Kendali	Pola Bindalmin	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.35. Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan	SOP tentang Prosedur Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Ketentuan Persyaratan Pelayanan Produk Pengadilan	SK Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tentang Persyaratan Permintaan Produk Pengadilan	1. KMA 1-144 tahun 2009 2. KMA Nomor 26 Tahun 2012	0 5 10
3	Adanya permintaan Produk Pengadilan dari para pihak	Formulir permintaan Produk Pengadilan	1. KMA 32/SK/V/2006 tentang Buku II 2. KMA No. 26 Tahun 2012	0 5 10
4	Adanya Ketentuan tarif Biaya PNB	SK Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tentang Tarif Biaya PNB	PP No.53 Tahun 2008	0 5 10
5	Adanya Pembayaran sesuai Dengan tarif yang Ditentukan	Bukti/Kuitansi Pembayaran PNB	Pola Bindalmin	0 5 10
6	Adanya Penyerahan Produk Pengadilan	Bukti Penyerahan	Pola Bindalmin	0 5 10

7	Adanya Pencatatan Penyerahan Produk Pengadilan	Buku Kendali	Pola Bindalmin	0 5 10
---	--	--------------	----------------	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.36. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	SOP tentang Prosedur Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya pengajuan gugatan sederhana Perkara Ekonomi Syariah) Dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Berkas gugatan sederhana Perkara Ekonomi Syariah	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
3	Adanya pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan pendaftaran Gugatan Sederhana Dalam Perkara Ekonomi Syariah oleh panitera	Check list (daftar periksa) dan catatan yang menyatakan memenuhi syarat	1. Buku II 2. Perrma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 1. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
4	Adanya penaksiran Panjar Biaya Perkara	Instrumen Taksiran Panjar Biaya Perkara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. SEMA Nomor 4 Tahun 2008	0 5 10
5	Adanya pembayaran panjar biaya perkara	1. Slip setoran pembayaran ke BANK 2. SKUM yang sudah dicap lunas 3. Buku Bantu Keuangan Perkara 4. Buku Kas Umum Keuangan Perkara	1. BUKU II 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
6	Adanya perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah yang teregister	Register Perkara Gugatan Sederhana ekonomi syariah	Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10

7	Adanya Hakim tunggal yang ditunjuk	Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal	Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
8	Adanya Panitera Pengganti yang ditunjuk	Penunjukan Panitera Pengganti	Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
9	Adanya JS/JSP yang ditunjuk	Penunjukan JS/JSP	Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
10	Adanya Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal (dihapus)	Instrumen Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	Pasal 120 dan 121 HIR/Pasal 145 dan 146 R. Bg	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.37. Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	SOP tentang Prosedur Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Permohonan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Nilai Limit Gugatan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Instrumen Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana	1. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 2. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
3	Adanya Kelengkapan Persyaratan Gugatan Sederhana Dalam Perkara Ekonomi Syariah	Instrumen Taksiran Panjar Biaya Perkara	1. Buku II 2. Perrma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 3. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara	0 5 10

			Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	
4	Adanya Taksiran Panjar Biaya Perkara	Slip Setoran Panjar Biaya Perkara Dari Bank	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya Slip Setoran Panjar Biaya Perkara Dari Bank	1. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 2. Buku Bantu Keuangan Perkara 3. Buku Kas Umum Keuangan Perkara	Buku II	0 5 10
6	Adanya Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	Buku Register Perkara Ekonomi Syariah Sederhana	Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
7	Adanya Perkara Ekonomi Syariah Yang Sudah Diregister	1. Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal 2. Penugasan Panitera Pengganti	Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
8	Adanya Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal	Instrumen Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	Pasal 120 dan 121 HIR/Pasal 145 dan 146 R. Bg	0 5 10
9	Adanya Pemeriksaan Pendahuluan	Instrumen Perkara Tidak Termasuk Kategori Gugatan Sederhana	Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
10	Adanya Penetapan Perkara Tidak Termasuk Kualifikasi Gugatan Sederhana	1. Instrumen Pengembalian Sisa Panjar 2. Instrumen Pencoretan Perkara Dari Register Perkara Sederhana	Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.38. Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	SOP tentang Prosedur Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan	0 5 10

			naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya Pengajuan Keberatan Dari Pihak Beperkara	Instrumen Taksiran Panjar Biaya Perkara Keberatan Dalam Ekonomi Syariah	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya Slip Storan Pembayaran Panjar Biaya Perkara Dari Bank	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
4	Adanya SKUM Panjar Biaya Perkara Pengajuan Keberatan Atas Putusan Dalam Perkara Sederhana Ekonomi Syariah	1. Buku Bantu Keunagan Perkara Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah 2. Buku Kas Umum Keuangan Perkara Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah 3. Buku Register Pendaftaran Keberatan Atas Putusan Dalam Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
5	Adanya Pendaftaran Perkara Pengajuan Keberatan Atas Putusan Dalam Ekonomi Syariah	1. Akta Pernyataan Keberatan 2. Instrumen Pernyataan Akta Keberatan	Pasal 21 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
6	Adanya Pengajuan Akta Pernyataan Keberatan Yang Melampaui Batas Waktu	Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bahwa Pengajuan Keberatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	Pasal 22 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
7	Adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bahwa Pengajuan Keberatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	1. Instrumen Pengembalian Sisa Panjar 2. Instrumen Amar Penetapan Pengajuan Keberatan Tidak Dapat Diterima	Pasal 22 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	20% – 79% terpenuhi sebagian	<20% tidak terpenuhi
Standar					
3.39. Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu					
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor	
1.	Adanya Prosedur Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	SOP tentang Prosedur Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10	
2	Adanya Pengajuan Keberatan Dari Pihak Beperkara	Memori keberatan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10	
3	Adanya pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan upaya keberatan	Check List (Daftar periksa) dari Meja I	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10	
4	Adanya pemeriksaan mengenai tenggang waktu permohonan upaya keberatan	Penetapan panitera	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10	
5	Adanya pengiriman memori keberatan kepada termohon	Bukti pengiriman memori keberatan	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10	

			2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	
6	Adanya kontra memori keberatan dari termohon	Kontra memori keberatan	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
7	Adanya majelis hakim yang ditunjuk	Penetapan penunjukan majelis hakim	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
8	Adanya panitera pengganti yang ditunjuk	Penunjukan panitera pengganti	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
9	Adanya pemeriksaan permohonan keberatan oleh majelis hakim	Draft putusan	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata	0 5 10

			Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	
10	Adanya hari sidang yang ditentukan	Penetapan hari sidang	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
11	Adanya sidang pembacaan putusan permohonan keberatan oleh majelis hakim	1. Putusan 2. BAS	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
12	Adanya pemberitahuan isi putusan kepada pemohon dan termohon	Relaas pemberitahuan isi putusan	1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 3. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.40. Pelayanan Banding				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya Prosedur Pelayanan Banding	SOP tentang Prosedur Pelayanan Banding	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012	0 5 10

			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2.	Adanya Permohonan Banding	Instrumen Taksiran Panjar Biaya Perkara Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
3.	Adanya pembayaran panjar biaya perkara banding	1. Slip setoran pembayaran ke BANK 2. SKUM yang sudah dicap lunas 3. Akta Pernyataan Banding 4. Buku Bantu Keuangan Perkara Banding 5. Buku Kas Umum Keuangan Perkara Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
4.	Adanya pencatatan banding pada buku register banding	Buku Register Permohonan Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
5.	Adanya Pemberitahuan Pernyataan Banding	1. Instrumen Pemberitahuan Pernyataan Banding 2. Relas pemberitahuan pernyataan banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
6.	Adanya Memori Banding	1. Tanda terima memori banding 2. Instrumen Perintah Pemberitahuan Memori Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
7.	Adanya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding	Relas pemberitahuan Memori Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
8.	Adanya kontra memori banding	1. Tanda terima kontramemori banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10

		2. Instrumen Perintah Pemberitahuan Kontra Memori Banding	3. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	
9.	Adanya pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding	<i>Relaas</i> Pemberitahuan Memori Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
10.	Adanya pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Relaas pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
11.	Adanya Atau Tidak Adanya pelaksanaan inzage Pembanding dan Terbanding	Akta inzage Atau Surat Keterangan Tidak Inzage Pembanding dan Terbanding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. KMA Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan	0 5 10
12.	Adanya Pengiriman Biaya Proses Banding Ke Pengadilan Tinggi Agama	1. Instrumen Pengiriman Biaya Proses Ke Pengadilan Tinggi Agama 2. Bukti Pengiriman Biaya Perkara Banding ke Pengadilan Tinggi Agama 3. Buku Bantu Keuangan Perkara Banding 4. Buku Kas Umum Keuangan Perkara Banding	Perma No 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	0 5 10
13.	Adanya pengiriman bundel A dan B ke Pengadilan Tinggi Agama	Bukti Pengiriman Berkas Banding	1. Buku II 2. KMA Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.41. Pelayanan Kasasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya Prosedur Pelayanan Kasasi	SOP tentang Prosedur Pelayanan Kasasi	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya pembayaran panjar biaya kasasi	1. Taksiran panjar biaya 2. Slip Setoran untuk Pembayaran Panjar Biaya Perkara ke Bank atau Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui rekening virtual 3. SKUM yang sudah distempel lunas	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. SEMA No. 4 Tahun 2008	
3.	Adanya pengajuan permohonan kasasi	Akta pernyataan kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. SEMA No. 4 Tahun 2008	0 5 10
4.	Adanya pencatatan perkara kasasi	Buku register Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
5.	Adanya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
6.	Adanya penyampaian memori kasasi dari pemohon ke Pengadilan	1. Tanda terima 2. memori kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10

7.	Adanya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada termohon	<i>Relaas</i> Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
8	Adanya penyerahan kontra memori Kasasi dari termohon Kasasi ke Pengadilan	1. Instrumen Perintah Pemberitahuan kontra Memori Kasasi 2. Kontra memori kasasi 3. Tanda terima kontra memori kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
9	Adanya pemberitahuan kontra memori Kasasi kepada pemohon Kasasi	Relaas pemberitahuan kontra memori Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
10	Adanya Pengiriman Biaya Proses Kasasi Ke Mahkamah Agung RI	1. Instrumen permintaan pengiriman biaya proses kasasi dari Panmud gugatan kepada kasir 2. Bukti pengiriman (ressi slip setoran)	Perma No 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	0 5 10
11	Adanya pengiriman dokumen elektronik kasasi dan pengunduhan dalam aplikasi direktori putusan	1. Bukti kirim 2. Screen shoot Aplikasi		
13	Adanya pengiriman bundel A dan B ke Mahkamah Agung RI	Bukti Pengiriman Berkas Kasasi	1. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Buku II 3. KMA Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.42. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat	SOP tentang Prosedur Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10

	Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya pembayaran panjar biaya kasasi	1. <u>Taksiran panjar biaya</u> 2. Slip Setoran untuk Pembayaran Panjar Biaya Perkara ke Bank atau Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui rekening virtual 3. SKUM yang sudah distempel lunas	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. SEMA No. 4 Tahun 2008	0 5 10
3.	Adanya permohonan Kasasi Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Permohonan Kasasi Melebihi Batas Waktu	Surat keterangan Paniter tidak memenuhi syarat formal	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 46 ayat (1) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 4. SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
4.	Adanya penetapan Ketua tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima	Surat penetapan Ketua tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 4. SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
5.	Adanya Pemberitahuan Penetapan Ketua Pengadilan	Relaas pemberitahuan penetapan Ketua Pengadilan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 4. SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
6.	Adanya pencatatan terhadap Permohonan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal	1. Register induk perkara kasasi dicatat dengan tidak memenuhi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang	0 5 10

		syarat (TMS) pada kolom keterangan 2. Register induk perkara gugatan / permohonan dicatat dengan tidak memenuhi syarat (TMS) pada kolom keterangan	Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 4. SEMA Nomor 8 Tahun 2011	
7.	Adanya pelaporan perkara yang tidak memenuhi syarat kepada Mahkamah Agung	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 4. SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
8	Adanya pengembalian sisa panjar biaya perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formal	1. Surat permohonan dari Pengadilan Pengaju kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengembalikan biaya Kasasi yang telah dikirim 2. Instrumen perintah pengembalian sisa panjar dari Ketua 3. Bukti pengembalian sisa panjar	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 4. SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.43. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya Prosedur Pelayanan Kasasi Yang Tidak Mengajukan Memori Kasasi	SOP tentang Prosedur Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang	0 5 10

			pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2.	Adanya pembayaran panjar biaya kasasi	1. <u>Taksiran panjar biaya</u> 2. Slip Setoran untuk Pembayaran Panjar Biaya Perkara ke Bank atau Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui rekening virtual 3. SKUM yang sudah distempel lunas	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. SEMA No. 4 Tahun 2008	
3.	Adanya pengajuan permohonan kasasi	Akta pernyataan kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. SEMA No. 4 Tahun 2008	
4.	Adanya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	<i>Relaas</i> Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
5.	Adanya keterangan dari Panitera bahwa pemohon tidak membuat memori kasasi	Surat keterangan panitera tentang perkara kasasi TMS	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
6.	Adanya penetapan Ketua tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima	Surat penetapan Ketua tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
7.	Adanya pencatatan terhadap Permohonan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal	1. Register induk perkara kasasi dicatat dengan TMS pada kolom keterangan 2. Register induk perkara gugatan / permohonan dicatat dengan TMS pada kolom keterangan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10

8.	Adanya nya pemberitahuan Penetapan Ketua Tentang Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima	Relaas pemberitahuan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 4. SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
9.	Adanya laporan permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal ke Mahkamah Agung	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 4. SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
10	Adanya pengembalian sisa panjar biaya perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formal	1. Instrumen perintah pengembalian sisa panjar dari Ketua 2. Bukti pengembalian sisa panjar	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 4. SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.44. Pelayanan Peninjauan Kembali				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Peninjauan Kembali	SOP tentang Prosedur Pelayanan Peninjauan Kembali	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya pembayaran panjar biaya peninjauan kembali	1. <u>Taksiran panjar biaya</u> 2. Slip Setoran untuk Pembayaran Panjar Biaya Perkara ke Bank atau Bukti Pembayaran Biaya Perkara PK melalui rekening virtual	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10

		3. SKUM yang sudah distempel lunas		
3.	Adanya pengajuan permohonan PK bersama risalah PK	1. Risalah PK 2. Tanda terima risalah PK	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
4	Adanya Penerimaan Permohonan PK	Akte permohonan PK	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman	0 5 10
5	Adanya Hakim yang ditunjuk	Penetapan penunjukan Hakim	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
6	Adanya Panitera Pengganti yang ditunjuk	Penunjukan Panitera Pengganti	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
7	Adanya JS/JSP yang ditunjuk	Penunjukan JS/JSP	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
8	Adanya hari sidang yang ditetapkan	PHS	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
9	Adanya pemanggilan pemohon PK	Relaas panggilan pemohon	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
10	Adanya pemberitahuan permohonan PK kepada termohon	Relaas pemberitahuan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
11	Adanya jawaban atas permohonan PK	1. Jawaban permohonan PK 2. Tanda terima jawaban permohonan PK	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
12	Adanya pemberitahuan jawaban kepada pemohon PK	Relaas pemberitahuan jawaban PK	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10

13	Adanya penyusunan berkas perkara PK	Bundel B peninjauan kembali	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
14	Adanya pengiriman berkas dan dokumen elektronik PK	1. Bundel A dan B 2. Bukti pengiriman 3. Bukti E – dokumen melalui SIPP	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.45. Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama	SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya Permohonan Perkara Prodeo	Surat gugatan/permohonan yang dilampiri SKTM	1. Buku II 2. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg 3. Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
3.	Adanya Majelis Hakim yang ditunjuk	Penetapan Majelis Hakim	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg	0 5 10
4.	Adanya Panitera Pengganti yang ditunjuk	Penugasan Panitera Pengganti	1. Buku II 2. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg 3. Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
5.	Adanya JS/JSP yang ditunjuk	Penunjukan JS/JSP	1. Buku II 2. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
6.	Adanya hari sidang yang ditetapkan	PHS	1. Buku II 2. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg 3. Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10

7.	Adanya pemanggilan para pihak	Relaas panggilan	1. Buku II 2. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg 3. Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
8.	Adanya Sidang Pemeriksaan Perkara Prodeo	Berita acara persidangan	1. Buku II 2. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg 3. Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
9.	Adanya sidang Putusan Sela Izin Berperkara Secara Prodeo	Putusan sela(yang dikabulkan)	1. Buku II 2. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg 3. Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
10.	Adanya pemberitahuan isi putusan sela kepada pihak yang tidak hadir	1. Instrumen pemberitahuan putusan dari majelis kepada JSP 2. Relaas pemberitahuan isi putusan sela	1. Buku II 2. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg 3. Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.46. Pelayanan Prodeo Tingkat Banding				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya permohonan perkara banding secara prodeo	Berkas permohonan perkara banding secara prodeo yang dilampiri SKTM	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
3.	Adanya pencatatan permohonan perkara banding secara prodeo	Register perkara prodeo		
4.	Adanya penunjukan majelis hakim	Penetapan Penunjukan majelis Hakim	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10

5.	Adanya penunjukkan panitera pengganti	Penunjukan Panitera Pengganti	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
6.	Adanya Penetapan Hari Sidang (PHS)	Penetapan Hari Sidang	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
7.	Adanya pemberitahuan kepada termohon	Relaas pemberitahuan adanya banding prodeo	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
8.	Adanya pemanggilan para pihak	Relaas panggilan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
9	Adanya sidang pemeriksaan permohonan banding secara prodeo	Berita acara sidang	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
10	Adanya pengiriman berkas bundel A dan pemeriksaan persidangan prodeo ke Pengadilan Tinggi Agama	1. Bukti pengiriman berkas 2. Bundel A asli 3. Berita Acara Sidang	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
11	Adanya penetapan izin Permohonan Berperkara Secara Prodeo dari Pengadilan Tinggi Agama	Penetapan izin permohonan perkara secara prodeo dari PTA	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura 4. Pasal 246 ayat (1) HIR/Pasal 281 ayat (1) R. Bg	0 5 10
12	Adanya pemberitahuan penetapan izin banding prodeo	1. Instrumen pemberitahuan penetapan izin banding prodeo 2. Relaas pemberitahuan penetapan kepada pemohon	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura 4. Pasal 246 ayat (2) HIR/Pasal 281 ayat (2) R. Bg	0 5 10
13	Adanya akta permohonan banding prodeo	Akta permohonan banding prodeo	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10

14	Adanya SKUM dengan angka Nol Rupiah Biaya Perkara Banding	1. SKUM Nol 2. Buku Bantu Keuangan Perkara Banding 3. Buku Kas Umum Keuangan Perkara Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
15.	Adanya pencatatan banding pada buku register banding	Buku Register Permohonan Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
16.	Adanya Pemberitahuan Pernyataan Banding	1. Intrumen Pemberitahuan Pernyataan Banding 2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
17.	Adanya berkas perkara	Instrumen pemberitahuan Inzage Pembanding dan Terbanding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
18	Adanya pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Relaas pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
19.	Adanya Atau Tidak Adanya pelaksanaan inzage Pembanding dan Terbanding	Akta inzage Atau Surat Keterangan Tidak Inzage Pembanding dan Terbanding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
20.	Adanya Memori Banding	1. Intrumen Perintah Pemberitahuan Memori Banding 2. Tanda terima memori banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
21.	Adanya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding	Relaas pemberitahuan Memori Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan	0 5 10

			Ulangan Di Jawa Dan Madura	
22.	Adanya kontra memori banding	1. Instrumen Perintah Pemberitahuan Kontra Memori Banding 2. Tanda terima kontra memori banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
23.	Adanya pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding	<i>Relaas</i> Pemberitahuan kontra Memori Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
24.	Adanya Pengiriman Proses Banding Ke Pengadilan Tinggi Agama	1. Bukti Pengiriman Biaya Perkara Banding ke Pengadilan Tinggi Agama	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.47. Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya permohonan perkara kasasi secara prodeo	Akta pernyataan kasasi prodeo	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
3.	Adanya penunjukkan majelis hakim	Penetapan Majelis Hakim	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
4.	Adanya penunjukkan panitera pengganti	Penunjukan panitera pengganti	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
5.	Adanya Penetapan Hari Sidang (PHS)	Penetapan Hari Sidang	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
6.	Adanya panggilan sidang pemeriksaan perkara prodeo	Relaas panggilan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10

7.	Adanya pemeriksaan ber perkara secara prodeo	Berita acara sidang prodeo	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
8.	Adanya pemberitahuan pernyataan kasasi	1. Instrumen pemberitahuan pernyataan kasasi 2. Relaas pemberitahuan kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
9	Adanya memori kasasi	Tanda terima memori kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
10	Adanya pemberitahuan memori kasasi	1. Instrumen pemberitahuan memori kasasi 2. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
11	Adanya kontra memori kasasi	Tanda terima kontra memori kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
12	Adanya pemberitahuan kontra memori kasasi	1. Instrumen pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi 2. Relaas pemberitahuan kontra memori kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
13	Adanya pemberitahuan kontra memori kasasi	instrumen pemberitahuan kontra memori kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
14	Adanya Pengiriman Dokumen Elektronik Kasasi	Instrumen E-Dokumen	SEMA Nomor 1 tahun 2014	0 5 10
15.	Adanya pengiriman berkas bundel a dan bundle B Serta Berita Acara Pemeriksaan Majelis Hakim Dan Keterangan Tidak Mampu Ke Mahkamah Agung	Bukti Pengiriman Berkas Kasasi Prodeo Ke Mahkamah Agung RI	1. Pola Bindalmin 2. Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN		≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi		
Standar				
3.48. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Pembebasan	SOP tentang Prosedur Pelayanan Pembebasan	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012	0 5

	Biaya Perkara Tingkat Pertama	Biaya Perkara Tingkat Pertama	2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	10
2	Adanya persyaratan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan	Berkas permohonan pembebasan biaya perkara dan dokumen pendukung	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
3	Adanya pertimbangan panitera mengenai kelayakan permohonan layanan pembebasan biaya perkara	Dokumen pertimbangan mengenai kelayakan permohonan layanan pembebasan biaya perkara yang ditandatangani Panitera	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
4	Adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dengan Niali Rp0,- (nol rupiah)	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya Pendaftaran Perkara	Instrumen Pendaftaran Perkara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
6	Adanya Pencatatan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	1. Register Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara 2. Register Perkara Gugatan/Permohonan	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
7	Adanya Pelaporan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Laporan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.49. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	SOP tentang Prosedur Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10

2	Adanya Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding Dengan Melampirkan Bukti Ketidakmampuan Dalam Ekonomi	Instrumen Pemeriksaan Persyaratan Dan Ketersediaan Anggaran	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
3	Adanya Pemeriksaan Persyaratan Dan Ketersediaan Anggaran	Instrumen Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
4	Adanya Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	SKUM dengan nilai Rp 0,- (nol rupiah)	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
5	Adanya SKUM dengan nilai Rp 0,- (nol rupiah)	Akta Pernyataan Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
6	Adanya Akta Pernyataan Banding	Buku Register Permohonan Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
7	Adanya Pemberitahuan Pernyataan Banding	<i>Relaas</i> Pemberitahuan Pernyataan Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014 4. PMK Nomor 190 Tahun 2012	0 5 10
8	Adanya Memori Banding Yang Disertai Dan Atau Surat Penetapan Pembebasan Layanan Perkara	Bukti Tanda Terima Memori Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014 4. PMK Nomor 190 Tahun 2012	0 5 10
9	Adanya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding	<i>Relaas</i> Pemberitahuan Memori Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
10	Adanya kontra memori banding Disertai Dan Atau Surat Penetapan Pembebasan Layanan Perkara	Bukti tanda terima kontra memori banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
11	Adanya pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding Dan Atau Surat Penetapan Pembebasan Layanan Perkara	<i>Relaas</i> pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
12	Adanya pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding	<i>Relaas</i> pemberitahuan Inzage Pembanding dan Terbanding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
13	Terdapatnya Atau Tidak Adanya pelaksanaan inzage Pembanding dan Terbanding	Akta inzage Atau Surat Keterangan Tidak Inzage Pembanding dan Terbanding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10

14	Adanya Penetapan Ketua Tentang Pembebasan Biaya Pada Tingkat Banding Dan Permintaan Panitera Kepada PPK	Bukti Pengeluaran Biaya Proses Perkara Banding Dari Bendahara Pengeluaran	1. PERMA No 3 Tahun 2012 2. PMK Nomor 190 Tahun 2012 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
15	Adanya Pengiriman Biaya Proses Banding Ke Pengadilan Tinggi Agama	Bukti Pengiriman Biaya Proses Ke Pengadilan Tinggi Agama	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014 4. PERMA No 3 Tahun 2012	0 5 10
16	Adanya pengiriman bundel A dan B ke Pengadilan Tinggi Agama	Bukti Pengiriman Berkas Banding	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.50. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	SOP tentang Prosedur Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Kasasi Dengan Melampirkan Bukti Ketidak mampuan Dalam Ekonomi	Instrumen Pemeriksaan Persyaratan Dan Ketersediaan Anggaran	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
3	Adanya Pemeriksaan Persyaratan Dan Ketersediaan Anggaran	Instrumen Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
4	Adanya Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	SKUM dengan Nilai Rp 0,- (nol rupiah)	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
5	Adanya SKUM dengan Nilai Rp 0,- (nol rupiah)	Akta Pernyataan Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10

6	Adanya Akta Pernyataan Kasasi	Buku Register Permohonan Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
7	Adanya Pemberitahuan Akta Pernyataan Kasasi	<i>Relaas</i> Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
8	Adanya Memori Kasasi Yang Disertai Dan Atau Surat Penetapan Pembebasan Layanan Perkara	Bukti Tanda Terima Memori Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
9	Adanya Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	<i>Relaas</i> Pemberitahuan Memori Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
10	Adanya kontra memori Kasasi Disertai Dan Atau Surat Penetapan Pembebasan Layanan Perkara	Bukti tanda terima Kontra Memori Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
11	Adanya pemberitahuan kontra memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Dan Atau Surat Penetapan Pembebasan Layanan Perkara	<i>Relaas</i> pemberitahuan dan Bukti penyerahan kontra memori Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
12	Adanya Pengiriman Biaya Proses Kasasi Ke Mahkamah Agung RI	Bukti Pengiriman Biaya Proses Ke Mahkamah Agung RI	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. PERMA No 3 Tahun 2012 4. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
13	Adanya Pengiriman Dokumen Elektronik Kasasi	Instrumen E-Dokumen	SEMA Nomor 1 Tahun 2014	0 5 10
14	Adanya pengiriman bundel A dan B ke Mahkamah Agung RI	Bukti Pengiriman Berkas Kasasi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.51. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur pelayanan permohonan Eksekusi Riil	SOP tentang Prosedur Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permohonan Eksekusi Riil	Surat Permohonan Eksekusi Riil	1. Buku II 2. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10

3	Adanya pembayaran eksekusi Riil	1. Instrumen Taksiran Panjar Biaya Perkara 2. Slip Setoran Panjar biaya Eksekusi dari Bank 3. SKUM	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya pencatatan Permohonan Eksekusi Riil	1. Buku Register Pendaftaran Eksekusi 2. Buku Bantu Keuangan Biaya Eksekusi 3. Buku Kas Umum Keuangan Biaya Eksekusi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya penetapan Aanmaning	Penetapan Aanmaning	1. Pola Bindalmin 2. Buku I 3. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
6	Adanya penunjukkan jurusita/jurusita pengganti	Penunjukkan jurusita/jurusita pengganti	1. Pola Bindalmin 2. Buku I 3. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan Aanmaning	1. Instrumen perintah panggilan aanmaning 2. Relas panggilan aanmaning	1. Pola Bindalmin 2. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
8	Adanya sidang Aanmaning	Berita Acara Sidang Aanmaning	Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
9	Adanya laporan tidak melaksanakan isi putusan dari pemohon eksekusi	Penetapan Eksekusi	Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
10	Adanya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Para Pihak dan Instansi Terkait	Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
11	Adanya pelaksanaan eksekusi	1. Berita Acara Eksekusi 2. Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi	Pasal 197 Ayat (5) HIR/Pasal 209 Ayat (3) R.Bg	0 5 10
12	Adanya berita acara eksekusi Riil	Instrumen Penyampaian Atau Penyerahan Berita Acara Eksekusi Riil Kepada Pihak atau Yang Terkait dan tanda terima	Pasal 197 Ayat (5) HIR/Pasal 209 Ayat (3) R.Bg	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.52. Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	SOP tentang Prosedur Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	Surat Permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang	1. Buku II 2. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
3	Adanya pembayaran eksekusi	1. Instrumen Taksiran Panjar Biaya Perkara 2. Slip Setoran Panjar biaya Eksekusi dari Bank 3. SKUM 4. Jurnal Keuangan perkara eksekusi 5. Induk Keuangan Perkara eksekusi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya pencatatan permohonan Eksekusi pembayaran sejumlah uang	Buku Register Pendaftaran Eksekusi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya penetapan Aanmaning	Penetapan Aanmaning	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
6	Adanya penunjukkan jurusita/jurusita pengganti	Penunjukkan jurusita/jurusita pengganti	1. Pola Bindalmin 2. Buku I 3. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan Aanmaning	1. Instrumen perintah panggilan aanmaning 2. Relas panggilan aanmaning	1. Pola Bindalmin 2. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
8	Adanya sidang Aanmaning	Berita Acara Sidang Aanmaning	Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
9	Adanya laporan Nasabah atau si berhutang tidak melaksanakan prestasi	Penetapan Sita Eksekusi	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10

10	Adanya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Para Pihak dan Instansi Terkait	1. Instrumen pemberitahuan sita eksekusi 2. Relas pemberitahuan sita eksekusi	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
11	Adanya pelaksanaan sita eksekusi	Berita Acara Sita Eksekusi	Pasal 196 Ayat (5) HIR/Pasal 209 Ayat (3) R.Bg	0 5 10
12	Adanya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi	Bukti penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi	1. Buku II 2. Pasal 197 HIR /pasal 208 R.Bg	0 5 10
13	Adanya Penetapan Eksekusi	Penetapan Eksekusi	1. Buku II 2. Pasal 197 HIR /pasal 208 R.Bg	0 5 10
14	Adanya Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang ke Kantor Lelang	1. Berkas Permohonan pelaksanaan Lelang 2. Bukti Permohonan Lelang ke KPKNL	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
15	Adanya penunjukkan Penjual Lelang	Penetapan penunjukkan penjual lelang oleh Ketua PA	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
16	Adanya penetapan harga limit	Penetapan Harga limit	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
17	Adanya penetapan hari pelaksanaan lelang oleh kantor lelang negara	Bukti Penetapan hari pelaksanaan lelang oleh KPKNL	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
18	Adanya pengumuman Lelang	Bukti Pengumuman Lelang oleh Mas Media	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
19	Adanya pemberitahuan pelaksanaan lelang dari Kantor KPKNL kepada Pengadilan Agama dan Para Pihak	Bukti pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Para pihak	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
20	Adanya pelaksanaan lelang oleh juru lelang	Berita Acara Risalah Lelang	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang	0 5 10

			Petunjuk Pelaksanaan Lelang	
21	Adanya penetapan pemenang lelang	Penetapan pemenang lelang	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
22	Adanya penyerahan pembayaran hasil lelang	Bukti pentransferan hasil penjualan lelang ke rekening pengadilan agama	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
23	Adanya penyerahan hasil lelang kepada para pihak	Bukti penyerahan pembayaran hasil lelang	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
24	Adanya laporan keuangan eksekusi	Laporan LIPA 7b	1. Buku II 2. Surat Dirjen Badilang Tentang Pelaporan	

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.53. Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang	SOP tentang Prosedur Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	Surat permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang	1. Buku II 2. Pasal 224 dan HIR/Pasal 258 R.Bg 3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 4. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 5. Undang-Undang No.9 Tahun 2011 6. Undang-Undang No.9 Tahun 2006	0 5 10

3	Adanya pembayaran panjar biaya eksekusi	1. Slip Setoran Panjar Biaya Perkara dari Bank 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 3. Jurnal Keuangan perkara Eksekusi 4. Induk Keuangan Perkara Eksekusi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya pencatatan permohonan Eksekusi	Buku Register Pendaftaran Eksekusi	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya penetapan aanmaning	Penetapan Aanmaning	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
6	Adanya Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	1. Pola Bindalmin 2. Buku II 3. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
	Adanya pemberitahuan sidang Aanmaning	Relaas pemberitahuan Aanmaning	1. Pola Bindalmin 2. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
7	Adanya sidang Aanmaning	Berita Acara Sidang Aanmaning	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
8	Adanya laporan Nasabah atau si berhutang tidak melaksanakan prestasi	Penetapan Sita Eksekusi	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
9	Adanya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Para Pihak dan Instansi Terkait	1. Instrumen pemberitahuan sita eksekusi 2. Relaas pemberitahuan sita eksekusi	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
10	Adanya pelaksanaan sita eksekusi	Berita Acara Sita Eksekusi	Pasal 196 Ayat (5) HIR/Pasal 209 Ayat (3) R.Bg	0 5 10
11	Adanya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi	Bukti penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi	1. Buku II 2. Pasal 197 HIR /pasal 208 R.Bg	0 5 10
12	Adanya Penetapan Eksekusi	Penetapan Eksekusi	1. Buku II 2. Pasal 197 HIR /pasal 208 R.Bg	0 5 10
13	Adanya Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang ke Kantor Lelang	1. Berkas Permohonan pelaksanaan Lelang 2. Bukti Permohonan Lelang ke KPKNL	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10

14	Adanya penunjukkan Penjual Lelang	Penetapan penunjukkan penjual lelang	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
15	Adanya penetapan harga limit	Penetapan Harga limit	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
16	Adanya penetapan hari lelang oleh kantor lelang negara	Bukti Penetapan hari lelang oleh KPKNL	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	
17	Adanya pengumuman Lelang	Bukti Pengumuman Lelang oleh Mas Media	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	
18	Adanya pemberitahuan pelaksanaan lelang dari Kantor KPKNL kepada Pengadilan Agama dan Para Pihak	Bukti pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Para pihak	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
19	Adanya pelaksanaan lelang oleh juru lelang	Berita Acara Risalah Lelang	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
20	Adanya penetapan pemenang lelang	Penetapan pemenang lelang	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
21	Adanya penyerahan pembayaran hasil lelang	Bukti pentransferan hasil penjualan lelang ke rekening pengadilan agama	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
22	Adanya penyerahan hasil lelang kepada pemohon lelang	Bukti penyerahan pembayaran hasil lelang	1. Buku II 2. PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
23	Adanya laporan keuangan eksekusi	Laporan LIPA 7b	1. Buku II 2. Surat Dirjen Badilang Tentang Pelaporan	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.54. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	SOP tentang Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya penetapan Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan eksekusi		0 5 10
3	Adanya Permohonan Eksekusi Objek Sengketa berada di wilayah Pengadilan Agama Lain	1. Instrumen permohonan Eksekusi Objek Sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama Lain 2. Surat permohonan bantuan ke PA lain .	1. Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 ayat (2) R.Bg 2. Buku II	0 5 10
4	Adanya pengiriman biaya eksekusi ke Pengadilan Agama lain.	1. Instrumen perintah pengeluaran biaya eksekusi. 2. Bukti pengiriman biaya eksekusi ke Pengadilan lain	Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
5	Adanya Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Agama lain	1. Surat Pengantar dan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Agama yang dimohon bantuan 2. Bukti penyerahan berita acara eksekusi kepada para pihak dari PA lain	1. Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 Ayat (4) R.Bg 2. Buku II	0 5 10
6	Adanya laporan keuangan eksekusi	Laporan LIPA 7b	Buku II	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.55. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain	SOP tentang Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permintaan pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Agama lain	Surat permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi dari PA lain	1. Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 ayat (2) R.Bg 2. SEMA Nomor 5 Tahun 1999 3. SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10
3	Adanya pengiriman biaya eksekusi dari Pengadilan Agama lain	Bukti pengiriman biaya eksekusi dari PA lain	1. Pasal 195 HIR/Pasal 208 R.Bg 2. SEMA Nomor 5 Tahun 1999 3. SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10
4	Adanya penunjukkan jurusita	Penunjukkan jurusita	1. Pola Bindalmin 2. Buku I 3. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
5	Adanya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak	1. Instrumen pemberitahuan pelaksanaan eksekusi 2. Relas pemberitahuan eksekusi	1. Pasal 195 HIR/Pasal 208 R.Bg 2. SEMA Nomor 5 Tahun 1999 3. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 4. Buku II	0 5 10
6	Adanya pelaksanaan eksekusi	Berita Acara Eksekusi	1. Pasal 195 HIR/Pasal 209 ayat (4) R.Bg 2. SEMA Nomor 5 Tahun 1999 3. SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan dan penyerahan berita acara eksekusi	Bukti penyerahan berita acara eksekusi	1. Pasal 195 HIR/Pasal 206 Ayat (4) R.Bg 2. Buku II	0 5 10
8	Adanya pengiriman hasil pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Agama lain	Surat pengantar pengiriman berita acara pelaksanaan eksekusi	1. Pasal 195 HIR/Pasal 206 Ayat (4) R.Bg 2. Buku II	0 5 10

9	Adanya laporan keuangan eksekusi	Laporan LIPA 7b	Buku II	0 5 10
---	----------------------------------	-----------------	---------	--------------

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.56. Pelayanan Permohonan Konsinyasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur pelayanan permohonan konsinyasi	SOP tentang Prosedur Pelayanan Permohonan Konsinyasi	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permohonan penawaran konsinyasi dari pemohon konsinyasi	Surat permohonan penawaran konsinyasi	Pasal 24 Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	0 5 10
3	Adanya pembayaran panjar biaya konsinyasi	1. Instrumen taksiran panjar biaya konsinyasi 2. Slip setoran panjar biaya konsinyasi dari Bank 3. SKUM	Pasal 25 Ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	0 5 10
4	Adanya pencatatan konsinyasi	1. Buku Register Induk Konsinyasi 2. Buku Bantu Keuangan Konsinyasi 3. Buku Induk Keuangan Konsinyasi	1. Perlu Pengaturan tentang Pembayaran Panjar Biaya Konsinyasi 2. Perma Nomor 3 Tahun 2016 3. Pasal 26 Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	0 5 10

5	Adanya penetapan penunjukkan jurusita/jurusita pengganti dan saksi	Penetapan Ketua Pengadilan Agama tentang Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti yang dibantu dua orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran tunai	KUH. Perdata 1404 dan 1405 KUH. Perdata	0 5 10
6	Adanya perintah Ketua untuk melakukan penawaran pembayaran tunai	Penetapan Ketua untuk melakukan pembayaran tunai	Pasal 1405 KUH. Perdata	0 5 10
7	Adanya berita acara penawaran pembayaran tunai ditolak oleh pemilik harta	Berita Acara Penolakan Penawaran Pembayaran Tunai	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10
8	Adanya pemberitahuan kepada Majelis Hakim tentang penolakan pembayaran oleh pemilik harta	Penetapan Hakim Ketua Majelis/Hakim tentang hari sidang atas permohonan Pemohon dalam penawaran pembayaran tunai	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10
9	Adanya pemanggilan pemohon dan termohon konsinyasi	1. Instrumen pemanggilan 2. Relas Pemanggilan Pemohon dan Termohon Konsinyasi	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10
10	Adanya pelaksanaan sidang konsinyasi	1. Berita acara sidang permohonan konsinyasi 2. Penetapan Ketua Pengadilan Agama tentang menerima Permohonan Konsinyasi yang diajukan Pemohon dan memerintahkan Panitera untuk melaksanakan Penitipan	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10
11	Adanya perintah Ketua Pengadilan Agama Kepada Panitera untuk melaksanakan penitipan uang konsinyasi	1. Instrumen perintah penitipan pelaksanaan uang konsinyasi 2. Berita Acara Penitipan Uang si Berpiutang	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.57. Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal	SOP tentang Prosedur Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya permohonan sidang Itsbat Rukyah Hilal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan	Surat Permohonan Itsbat Rukyah Hilal	1. Buku II Mahkamah Agung RI 2. Angka IV. Huruf H. Angka 1 dan 2 Lampiran KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10
3	Adanya penunjukkan Majelis Hakim dalam Sidang Istbat Rukyah Hilal	Penunjukkan Majelis Hakim dalam Sidang Itsbat Rukyah Hilal	1. Buku II Mahkamah Agung RI 2. KAM Nomor KMA/095/X/2006	0 5 10
4	Adanya pelaksanaan pelaksanaan penyaksian Itsbat Rukyah Hilal	Penetapan tentang kesaksian Itsbat Rukyah Hilal	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
5	Adanya pencatatan Itsbat Rukyah Hilal	Buku Register Itsbat Rukyah Hilal dan Pemberian Nasehat	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
6	Adanya pelaporan Itsbat Rukyah Hilal	Laporan Itsbat Rukyah Hilal	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.58. Pengarsipan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur Pengarsipan	SOP tentang Prosedur Pengarsipan	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Berkas Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)	Berkas Perkara yang sudah BHT	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya Berkas perkara yang tersusun dalam Bok dan Rak Arsip	1. Instrumen Daftar Isi Box berkas Perkara 2. Daftar Isi Rak Arsip 3. Berkas perkara yang tersusun dalam Bok Arsip	4. Pola Bindalmin 5. Buku II	0 5 10
4	Adanya Keputusan Ketua tentang Alih Media Arsip	Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Alih Media Arsip	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
5	Adanya Arsip Perkara yang memenuhi Kriteria yang dialihmediakan	Arsip Perkara yang memenuhi Kriteria yang akan dialihmediakan	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
6	Adanya pencatatan di dalam Buku Register Arsip Perkara yang dialihmediakan	Buku Register Arsip Perkara yang dialih mediakan	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
7	Adanya berita acara arsip yang akan dialih mediakan	Berita Acara Arsip Yang Akan Dialihmediakan	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
8	Adanya laporan arsip yang dialih mediakan	Surat Laporan Ketua Kepada PTA/MS dan Mahkamah Agung RI tentang Arsip yang dialihmediakan	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.59. Pelayanan Pelaporan Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelaporan	SOP / Petunjuk teknis pelaporan perkara	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya petugas pengumpul dan pengolah data	SK Ketua Pengadilan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
3	Adanya data laporan perkara yang tervalidasi	LIPA 1 s.d LIPA 22	Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor. 0377.a/DjA/HM.00/2/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama	0 5 10
4	Adanya pengesahan data laporan perkara dari Panitera	Naskah laporan yang sudah ditandatangani	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
5	Adanya pengiriman laporan perkara	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman (ressi pos dan screen shoot email)	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10
6	Adanya pencatatan pngendalian pengiriman laporan	Buku kendali pengiriman laporan	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.60. Pengaduan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pengaduan	SOP tentang Prosedur Pengaduan	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012	0 5

			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	10
2	Adanya Penunjukan Petugas Pengaduan	SK Ketua Pengadilan Agama tentang Penunjukan Petugas layanan Pengaduan	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
3	Adanya Standar Layanan Pengaduan	SK Ketua Pengadilan Agama tentang SOP Pengaduan	1. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 2. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
4	Adanya Laporan Pengaduan Masyarakat	Register Laporan Pengaduan Masyarakat	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
5	Adanya Pengaduan Yang Telah Diregister	Arsip Penerusan Pengaduan Yang Dikirim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
6	Adanya Tim pemeriksa Pengaduan	SK Penunjukan yang menangani Pengaduan	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
7	Adanya Pengiriman Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan dari Badan yang Berwenang Menangani.	Arsip Tindaklanjut Atas Hasil Pemeriksaan Terlapor	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
8	Adanya Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan	Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.61. Pelayanan Permohonan Perceraian PNS dan TNI Polri				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	SOP tentang Prosedur Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya permohonan perceraian dari PNS atau TNI atau Polri yang sudah didaftar	1. Surat gugatan 2. Berkas perkara		0 5 10
3	Adanya persetujuan / penolakan perceraian dari atasan Penggugat/Pemohon	Surat persetujuan/penolakan perceraian dari atasan Penggugat/Pemohon		0 5 10
	Adanya pelaporan dari tergugat/termohon berstatus PNS , TNI dan Polri kepada atasan tentang perceraian	Surat keterangan dari atasan		0 5 10
4	Adanya Pelaporan perkara perceraian PNS, TNI dan Polri	Laporan Bulanan dan Tahunan perkara perceraian		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.62. Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Permohonan	SOP tentang Prosedur Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10

	Pendaftaran Surat Kuasa Khusus		3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya permohonan pendaftaran Surat Kuasa Khusus Profesional	1. Instrumen Syarat pendaftaran Surat Kuasa Khusus 2. Instrumen pemberitahuan PNPB pendaftaran Surat Kuasa Khusus	Buku II Mahkamah Agung RI PP No. 53 Tahun 2008	0 5 10
3	Adanya kelengkapan pendaftaran Surat Kuasa Khusus dan Bukti Penyetoran PNPB Surat Kuasa Khusus	1. Bukti Pendaftaran Surat Kuasa 2. Register Surat Kuasa Khusus		0 5 10
4	Adanya Bukti pendaftaran Surat Kuasa Khusus dari Penerima Kuasa	Pernyataan Kesediaan Hadir Bagi Semua Penerima Kuasa Pada Sidang Pertama		0 5 10
5	Adanya pelaporan pendaftaran Surat Kuasa Khusus	Laporan pendaftaran Surat Kuasa Khusus Bulanan, Semesteran dan Tahunan		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.63. Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	SOP tentang Prosedur Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya Permohonan Isbat Nikah Volunter yang telah terdaftar	1. Buku Register Isbat Nikah Volunter	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10

		2. Instrumen Penunjukan Majelis Hakim 3. Instrumen Perintah Pengumuman adanya Permohonan Isbat Nikah		
3	Adanya Perintah Pengumuman adanya Permohonan Isbat Nikah	Bukti Penyerahan <i>relaas</i> Pengumuman adanya Permohonan Isbat Nikah		0 5 10
4	Adanya keterangan dari Panitera telah selesai masa Pengumuman dan tidak ada yang mengajukan keberatan.	1. Intrumen Penetapan Hari sidang. 2. Buku Register Isbat Nikah.	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
5	Adanya Pelaporan Permohonan Isbat Nikah.	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan.		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.64. Pelayanan Pengelolaan ATK Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pengelolaan ATK Perkara	Petunjuk teknis prosedur pengelolaan ATK perkara	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya nya Penunjukan Petugas Pengelola ATK Perkara	SK Ketua PA Tentang Penunjukan Petugas Pengelola ATK Perkara	1. Perma 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaanya 2. Pola Bindalmin dan Buku II 3. Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
3	Adanya peraturan penggunaan biaya ATK perkara	SK ketua Pengadilan	1. Perma 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaanya 2. Pola Bindalmin dan Buku II 3. Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
4	Adanya Rencana Kebutuhan ATK untuk	Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP)	1. Perma 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012	0 5 10

	Proses Penyelesaian Perkara		tentang Piaya Proses dan Pengelolaannya 2. Pola Bindalmin dan Buku II 3. Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	
5	Adanya belanja kebutuhan ATK perkara	1. Kuitansi 2. Faktur belanja	1. Perma Nomor 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaannya 2. Pola Bindalmin dan Buku II 4. Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
6	Adanya pencatatan pengadaan ATK perkara	Buku / kartu persediaan ATK perkara	1. Perma 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaannya 2. Pola Bindalmin dan Buku II 3. Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
7	Adanya Pendistribusian Alat tulis kantor (ATK) Perkara	1. Formulir permintaan ATK 2. Tanda terima barang	1. Perma Nomor 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaannya 2. Pola Bindalmin 3. Buku II Mahkamah Agung RI 4. Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.65. Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Pengelolaan Keuangan Perkara	Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SE Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/111 /2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama	0 5 10

2	Adanya Penunjukan Petugas Pengelola Keuangan Perkara	SK KPA tentang Penunjukan Petugas Pengelola Keuangan Perkara	SE Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/111/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama	0 5 10
3	Adanya rekening penampungan panjar biaya perkara	Nomor rekening atas nama lembaga	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
4	Adanya penatausahaan keuangan perkara berbasis Pola Bindalmin pada Aplikasi SIPP	1. SKUM/Slip setoran BANK 2. Bukti transaksi harian 3. Buku induk keuangan 4. Buku jurnal keuangan perkara 5. Buku HHKL	1. SE Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/111/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama 2. SE Pedoman implementasi SIPP (cari)	0 5 10
5	Adanya penatausahaan keuangan perkara berbasis Akutansi pada aplikasi pendukung SIPP	1. Buku Kas Umum 2. Buku bantu kas tunai 3. Buku bantu BANK 4. Buku bantu panjar biaya (tingkat pertama, banding, kasasi, PK, konsignasi, eksekusi) 5. Buku bantu uang konsignasi 6. Buku bantu uang eksekusi 7. Buku bantu uang iwadl 8. Buku bantu HHK 9. Buku bantu persediaan materai 10. Buku bantu sisa panjar 11. Buku bantu uang perkara belum didaftar 12. Buku bantu uang ATK/proses 13. Buku bantu uang mohon bantuan delegasi pemeriksaan saksi/pemeriksaan panggilan dan pemberitahuan	SE Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/111/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama SE Pedoman implementasi SIPP	0 5 10
6	Adanya laporan pertanggungjawaban petugas pengelola keuangan perkara	1. Laporan rekonsiliasi 2. Laporan Komdanas	1. Pola Bindalmin 2. Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	20% – 79% terpenuhi sebagian	<20% tidak terpenuhi
Standar					
3.66. Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar					
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor	
1	Adanya Prosedur Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	SOP tentang Prosedur Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10	
2	Adanya Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar	SK Ketua PA tentang Penunjukan Petugas Pengelola ATK Perkara	1. Perma 02 Tahun 2009 Jo. Perma No 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara 2. Pola Bindalmin 3. Buku II Mahkamah Agung RI 4. Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10	
3	Adanya Rincian Penggunaan Panjar Biaya Perkara	1. Instrumen Penggunaan Biaya Panjar 2. Buku Bantu Jurnal	1. Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara 2. Surat Sekretaris MA RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 perihal Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara	0 5 10	
4	Adanya Bukti Pemberitahuan Adanya Sisa Panjar	Surat Pemberitahuan Kepada Pihak Untuk Pengambilan Sisa Panjar	1. KMA No. 26 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Buku II 4. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10	
5	Adanya Pencatatan Sisa Panjar	1. Rekapitulasi Sisa Panjar 2. Buku Kas Umum Dan 3. Buku Bantu	1. KMA No. 26 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Buku II 4. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10	

6	Adanya Bukti Pengembalian /Penyetoran Sisa Panjar	1. Kwitansi Tanda Terima Pengembalian Sisa Panjar 2. Bukti Setor Sisa Panjar Ke Kas Negara	1. KMA No. 26 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Buku II 4. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
7	Adanya Pelaporan Pengembalian sisa panjar dan penyetoran ke Kas Negara	Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	1. KMA No. 26 Tahun 2012 2. Pola Bindalmin 3. Buku II 4. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.67. Penerimaan Perkara Jinayat				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan	SOP tentang prosedur penerimaan perkara	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Pencatatan Perkara Jinayat	Register Perkara Jinayat	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013	0 5 10
3	Terdapat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	Penetapan Majelis Hakim (PMH)	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 4. Pola Bindalmin	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.68. Penetapan Majelis Hakim (PMH)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Perkara Yang Sudah Terdaftar	Instrumen Informasi Data Perkara	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 4. Pola Bindalmin	0 5 10
2	Terdapat Sistem Penunjukan Majelis Persidangan	Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 4. Pola Bindalmin	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.69. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (PP)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Perkara Yang Sudah Terdaftar	Instrumen Informasi Data Perkara	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 4. Pola Bindalmin	0 5 10
2	Terdapat Sistem Penunjukan Panitera Pengganti	Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 4. Pola Bindalmin	0 5 10

3	Terdapatnya Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti	Penunjukan Panitera Pengganti	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Qanun Nomor 7 Tahun 2013 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Pola Bindalmin	0 5 10
---	---	-------------------------------	--	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	20% – 79% terpenuhi sebagian	<20% tidak terpenuhi
Standar					
3.70. Penetapan Hari Sidang					
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor	
1	Terdapat Penetapan Majelis Hakim (PMH)	Penetapan Hari Sidang	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 4. Pola Bindalmin	0 5 10	
2	Terdapat Penetapan Hari Sidang	Pemberitahuan Hari Sidang Ke Jaksa	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 4. Pola Bindalmin	0 5 10	

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.71. Pemberitahuan Persidangan Kepada Jaksa				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Instrumen Pemberitahuan Kepada Jaksa	1. SOP Pemberitahuan Persidangan Kepada Jaksa 2. Bukti Penyerahan Pemberitahuan Sidang Kepada Jaksa	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013	0 5 10

2	Terdapat Instrumen Penerimaan Pemberitahuan sidang	Bukti Penerimaan Pemberitahuan Sidang dari Jaksa	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013	0 5 10
---	--	--	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.72. Persiapan Persidangan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Perkara Yang Akan disidangkan	1. SOP Persiapan Persidangan Perkara Jinayat 2. Check List Kesiapan Perangkat Kelengkapan Ruang Persidangan	1. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 2. SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Tentang Perlengkapan Persidangan	0 5 10
2	Terdapat Surat Pemberitahuan Sidang Kepada Jaksa	Nomor Antrian Sidang sesuai dengan Ruang Sidang Perkara yang bersangkutan	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.73. Diversi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Mekanisme Menghadirkan Pihak Terkait	Standar Operasional Prosedur (SOP) Diversi	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
2	Terdapat Penunjukan Fasilitator Diversi Oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah	SK Ketua Mahkamah Syar'iyah tentang Penunjukan Fasilitator Diversi	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013	0 5 10

			3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	
3	Terdapat Penunjukan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Fasilitator	SK Panitera Mahkamah Syar'iyah tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sebagai Pendamping Fasilitator	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
4	Terdapat Penetapan Perkara Yang Akan di Diversi	Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah tentang Perkara yang Akan di Diversi	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
5	Terdapat Penetapan Hari Musyawarah Diversi	Penetapan Hari Musyawarah Diversi	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
6	Terdapat Surat Pemberitahuan Kepada Kejaksaan Untuk Menghadirkan Pihak Terkait	Surat Pemberitahuan Kepada Kejaksaan Untuk Menghadirkan Pihak Terkait	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
7	Terdapat Kaukus (Pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui pihak lainnya)	Berita Acara Kaukus	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.74. Kesepakatan Diversi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Kesepakatan Diversi	Berita Acara Diversi Kesepakatan Diversi	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
2	Terdapat Penetapan Kesepakatan Diversi	Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang Kesepakatan Diversi	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
3	Terdapat Penyerahan Kesepakatan Diversi Kepada Hakim/Ketua Majelis	Tanda Terima Penyerahan Kesepakatan Diversi	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
4	Terdapat Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara dari Hakim/Ketua Majelis	Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.75. Penanganan Laporan Diversi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Laporan Tidak dilaksanakannya Kesepakatan Diversi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan.	Berita Acara Penerimaan Laporan Diversi yang tidak berhasil	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman	0 5 10

			Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	
2	Terdapat Pencatatan Laporan Dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan	Register	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
3	Terdapat Penetapan Hakim/ Majelis Hakim Baru	Penetapan Majelis Hakim	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
4	Terdapat Penunjukan Panitera Pengganti	Penunjukan Panitera Pengganti (P3)	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
5	Terdapat Pelaksanaan Persidangan	Penetapan Hari Sidang	1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.76. Proses Penahanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Pelimpahan Perkara Dari Kejaksaan	1. SOP Penetapan Penahanan 2. Penetapan Penahanan Oleh Hakim	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
2	Terdapat pemberitahuan penahanan kepada Jaksa dan Rutan	Bukti Penyerahan Penetapan Penahanan	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

3	Terdapat tanda terima penetapan penahanan dari Jaksa dan Rutan	Bukti Penerimaan Penetapan Penahanan	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
4	Terdapat Pemeriksaan Perkara	Jadwal Sidang	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.77. Perpanjangan Penahanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Pelimpahan Perkara Dari Kejaksaan	1.SOP Perpanjangan Penahanan 2.Penetapan Penahanan Oleh Hakim	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
2	Terdapat Pemeriksaan Perkara	Jadwal Sidang	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
3	Terdapat Masa Penahanan Terdakwa Habis	1. Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah 2. Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh 3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.78. Penangguhan Penahanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat pelimpahan perkara dari Jaksa	SOP Penangguhan Penahanan	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

2	Terdapat permohonan penangguhan penahanan	Bukti permohonan penangguhan penahanan	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
3	Terdapat penjamin dari keluarga dan penanggungjawab terdakwa	Bukti pernyataan penjaminan dari penjamin	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
4	Terdapat penetapan penangguhan penahanan	Penetapan Penangguhan Penahanan Oleh Majelis Hakim	1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.79. Pelayanan Banding				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur Permohonan banding	SOP Permohonan banding	1. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat 2. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 3. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat permohonan banding	1. Surat keterangan permohonan banding 2. Buku register banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
3	Terdapat surat pemberitahuan banding	Bukti penyerahan pemberitahuan banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
4	Terdapat memori banding	Memori banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
5	Terdapat penyampaian dan penyerahan memori banding	Surat penyerahan Memori banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
6	Terdapat kontra memori banding	Kontra memori banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
7	Terdapat penyampaian dan penyerahan kontra memori banding	Surat penyerahan kontra Memori banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
8	Terdapat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara	Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

9	Terdapat penyampaian pemeriksaan berkas	Bukti tanda terima penyampaian pemeriksaan berkas	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
10	Terdapat pelaksanaan pemeriksaan berkas	1. Berita acara pemeriksaan berkas 2. Surat keterangan tidak memeriksa berkas	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
11	Terdapat pengiriman bundel A dan bundel B ke Mahkamah Syar'iyah Aceh	Bukti pengiriman berkas banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.80. Pelayanan Kasasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur Permohonan Kasasi	SOP Permohonan Kasasi	1. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat 2. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 3. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat permohonan Kasasi	1. Surat keterangan permohonan Kasasi 2. Buku register Kasasi	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
3	Terdapat surat pemberitahuan Kasasi	Bukti penyerahan pemberitahuan Kasasi	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
4	Terdapat memori Kasasi	Memori Kasasi	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
5	Terdapat penyampaian dan penyerahan memori Kasasi	Surat penyerahan Memori Kasasi	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
6	Terdapat kontra memori Kasasi	Kontra memori Kasasi	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
7	Terdapat penyampaian dan penyerahan kontra memori Kasasi	Surat penyerahan kontra Memori Kasasi	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
8	Terdapat pengiriman bundel A dan bundle B ke Mahkamah Agung	Bukti pengiriman berkas Kasasi	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.81. Pelayanan Peninjauan Kembali				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Prosedur Permintaan Peninjauan Kembali	SOP Permintaan Peninjauan Kembali	1.Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat 2.PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 3.PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Terdapat Permintaan Peninjauan Kembali	1. Surat keterangan Permintaan Peninjauan Kembali 2. Buku Register Peninjauan Kembali	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
3	Terdapat surat pemberitahuan Peninjauan Kembali	Bukti penyerahan pemberitahuan Peninjauan Kembali	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
4	Terdapat penyerahan Risalah Peninjauan Kembali	Risalah Peninjauan Kembali	1.UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2.Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
5	Terdapat penyampaian dan penyerahan risalah Peninjauan Kembali	Surat penyerahan Risalah Peninjauan Kembali dan Novum	1.UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2.Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
6	Terdapat penunjukan hakim untuk memeriksa alasan Peninjauan Kembali	Penunjukan Hakim	1.UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2.Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
7	Terdapat penunjukan panitera	Penunjukan Panitera	1.UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2.Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
8	Terdapat penetapan hari sidang	1. PHS 2. Pemberitahuan sidang	1.UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2.Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
9	Terdapat pelaksanaan pemeriksaan alasan Peninjauan Kembali	1. Berita acara sidang alasan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera	1.UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2.Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

		2. Berita acara sidang pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera		
10	Terdapat pengiriman bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung	Bukti pengiriman berkas Peninjauan Kembali	1.Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat 2.KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	0 5 10

BAB IV. Sarana Prasarana Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.1. Sarana Gedung Perkantoran				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Tampak Muka Gedung Sudah Sesuai dengan Prototype MA	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2	Sudah Dipisahkan Antara Pintu Masuk dan Keluar Aparat Pengadilan dengan Pintu Masuk dan Keluar Pengguna Pengadilan	Photo	Surat Keputusan Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012	0 5 10
3	Terdapat Ruang Sidang	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 : PA Kelas 1A = 1 Ruang sidang besar, 4 ruang sidang biasa PA Kelas 1B = 1 Ruang sidang besar, 3 ruang sidang biasa PA Kelas 2 = 1 Ruang sidang besar, 2 ruang sidang biasa	0 5 10
4	Terdapat Ruang Mediasi	SK Penetapan Ruangan/ Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5	Terdapat Ruang Kaukus	SK Penetapan Ruangan	SK KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
6	Terdapat Ruang Posbakum	SK Penetapan Ruangan	Perma Nomor 1 Tahun 2014	0 5 10
7	Terdapat Ruang Tunggu Penasehat Hukum	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8	Terdapat Ruang Tunggu Sidang/Para Pihak Berperkara	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007, SK KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
9	Terdapat Ruang Tunggu Pelayanan/Publik	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10	Terdapat Ruang Tunggu Mediasi	SK Penetapan Ruangan	SK KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
11	Terdapat Ruang Tunggu Kaukus	SK Penetapan Ruangan	SK KMA 108 Tahun 2016	0 5 10

12	Terdapat Ruang Receptionis	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
13	Terdapat Ruang/Meja Informasi	SK Penetapan	SK KMA Nomor 26 Tahun 2012, SK Dirjen Badilag Nomor 0017 Tahun 2011	0 5 10
14	Terdapat Ruang/Meja Pengaduan	SK Penetapan	SK KMA Nomor 26 Tahun 2012	0 5 10
15	Terdapat Ruang Pendaftaran	SK Penetapan	SK KMA Nomor : KMA/001/SK/I/1991 dan SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006	0 5 10
16	Terdapat Ruang Kasir	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
17	Terdapat Ruang Laktasi	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
18	Terdapat Ruang Ketua	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
19	Terdapat Ruang Wakil	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
20	Terdapat Ruang Panitera	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
21	Terdapat Ruang Sekretaris	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
22	Terdapat Ruang Hakim	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
23	Terdapat Ruang Kepaniteraan	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
24	Terdapat Ruang Kesekretariatan	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
25	Terdapat Ruang PP	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
26	Terdapat Ruang Jurusita	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
27	Terdapat Ruang Arsip Perkara	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
28	Terdapat Ruang Arsip Umum	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

29	Terdapat Ruang Rapat/Pembinaan	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
30	Terdapat Ruang Perpustakaan	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
31	Terdapat Ruang Komputer/Server/IT	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
32	Terdapat Ruang Bendahara	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
33	Terdapat Ruang Gudang	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
34	Terdapat Ruang Tamu Ketua	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
35	Terdapat Ruang Tahanan Pria/Wanita (Khusus MS Di Aceh)	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
36	Terdapat Ruang Tahanan/Tunggu Anak (Khusus MS Di Aceh)	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
37	Terdapat Ruang Tunggu Jaksa (Khusus MS Di Aceh)	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
38	Terdapat Ruang Polisi (Khusus MS Di Aceh)	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
39	Terdapat Musholla	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
40	Terdapat Pos Satpam	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
41	Terdapat Toilet untuk Pengguna Pengadilan yang Terpisah dengan Toilet Aparatur Peradilan, Terpisah Antara Pria dan Wanita	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
42	Terdapat Area Parkir Pengguna Pengadilan yang Terpisah dengan Area Parkir Aparatur Peradilan	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
43	Terdapat Pintu Masuk yang Terpisah dengan Pintu Keluar Area Pengadilan	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
44	Terdapat Petunjuk Area Pengadilan	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
45	Terdapat Fasilitas Penyandang Difabel (Akses	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007, SE	0 5

	Masuk dan Keluar Gedung Pengadilan, Kursi Roda)		Dirjen Nomor 2940/DjA/HM.00/07/2017	10
46	Terdapat Pintu Khusus Majelis Di Ruang Sidang	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
47	Terdapat Alat Pendingin Ruang Sidang	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
48	Terdapat Prasasti Peresmian Gedung yang Dipasang Didepan Gedung Pengadilan	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
49	Terdapat Toilet Ketua, Wakil, Panitera dan Sekretaris	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
50	Terdapat Ruang Tamu Ketua yang Terpisah dengan Ruang Ketua	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
51	Terdapat Alat Pemadam Kebakaran Sesuai dengan Standar Keamanan Gedung	Photo		0 5 10
52	Terdapat Tv Control Cctv	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.2. Sarana Dekorasi Sidang (Sarana dalam Ruang Sidang)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja Hakim dan Meja Panitera yang Berlapis Laken Warna Hijau	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2	Terdapat Kursi Hakim dan Kursi Panitera	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3	Terdapat Panggung untuk Meja Sidang Majelis Hakim	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4	Terdapat Kursi Para Pihak	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5	Terdapat Kursi Para Saksi	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6	Terdapat Kursi Pengacara	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

7	Terdapat Kursi Pengunjung	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8	Terdapat Sekat Pembatas Ruang Pengunjung	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007, Surat Keputusan Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012	0 5 10
9	Terdapat Satu Set Palu Sidang	Photo		0 5 10
10	Terdapat Seperangkat Bendera Negara Terpasang Disebelah Kanan	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11	Terdapat Seperangkat Bendera Mahkamah Agung Terpasang Disebelah Kiri	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12	Terdapat Lambang Burung Garuda Indonesia Terpasang di Dinding Tengah Belakang Meja Sidang Majelis Hakim	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
13	Terdapat Kalender Tahun Berjalan	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
14	Terdapat Jam Dinding yang Terpasang untuk Bisa Dilihat Oleh Majelis Hakim	DBR/ Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
15	Terdapat Sound System dan Mikrofon	DBR/ Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
16	Terdapat Mushaf Al-Quran untuk Keperluan Penyumpahan	Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
17	Terdapat Seperangkat Komputer/Laptop yang Terkoneksi dengan SIPP	DBR/ Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007, Surat Dirjen Badilag Nomor.....	0 5 10
18	Terdapat Instrumen Persidangan (Instrumen Penundaan Sidang, Instrumen Panggilan, Instrumen Sita, Instrumen Amar Putusan, Instrumen Redaksi/Materai, Instrumen Pemberitahuan Putusan, Instrumen Kirim Biaya, Instrumen Tambahan Panjar Biaya Perkara, Instrumen Pengembalian Sisa Panjar)	Photo	SK KMA Nomor 1 Tahun 1991	0 5 10
19	Terdapat Audio To Text Recording (ATR)	DBR/ Photo	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.3. Sarana Ruang Pimpinan Pengadilan Agama/MS (Ketua dan Wakil)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja Biro	DBR/Photo		0 5 10
2	Telepon/Faksimile	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat 2 Kursi Hadap	DBR/Photo		0 5 10
4	Terdapat 1 Kursi Kerja	DBR/Photo		0 5 10
5	Terdapat 1 Globe/Peta Wilayah Hukum	Photo		0 5 10
6	Terdapat 1 Unit Komputer/Laptop dan Koneksi SIPP/Web	DBR/Photo		0 5 10
7	Terdapat 1 Lemari Buku	DBR/Photo		0 5 10
8	Terdapat Lemari Penyimpanan Toga	DBR/Photo		0 5 10
9	Terdapat 1 Jam Dinding	Photo		0 5 10
10	Terdapat 1 Cermin Besar	Photo		0 5 10
11	Terdapat 1 Pesawat Televisi/Lcd untuk Memonitor Area Pengadilan	DBR/Photo		0 5 10
12	Terdapat 1 Unit Kursi Tamu	DBR/Photo		0 5 10
13	Terdapat 1 Bel	Photo		0 5 10
14	Terdapat 1 Meja Kecil Tempat Telepon	DBR/Photo		0 5 10
15	Terdapat Gambar Presiden dan Wakil Presiden	Photo		0 5

				10
16	Terdapat Gambar Ketua MA	Photo		0 5 10
17	Terdapat Lambang Burung Garuda	Photo		0 5 10
18	Terdapat 1 Almanak Institusi	Photo		0 5 10
19	Terdapat 1 Keranjang Sampah	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.4. Sarana Ruang Tamu Ketua				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Kursi dan Meja Tamu	DBR/Photo		0 5 10
2	Satu Jam Dinding	Photo		0 5 10
3	Almanak Institusi	Photo		0 5 10
4	Bahan Bacaan	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.5. Sarana Ruang Rapat				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja Rapat dengan Kapasitas 20 Orang	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat White Board	DBR/Photo		0 5 10

3	Terdapat LCD Proyektor/Infocus/Sound System	DBR/Photo		0 5 10
4	Terdapat Telepon Ruangan	DBR/Photo		0 5 10
5	Terdapat 1 Jam Dinding	Photo		0 5 10
6	Terdapat Almanak Institusi	Photo		0 5 10
7	Terdapat Gambar Mantan Ketua Pengadilan	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.6. Sarana Ruang Panitera dan Sekretaris				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja Kerja	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat 1 Kursi Kerja	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat 2 Kursi Hadap	DBR/Photo		0 5 10
4	Terdapat 1 Unit Kursi Tamu	DBR/Photo		0 5 10
5	Terdapat 1 Unit Komputer/Laptop dan Koneksi Internet	DBR/Photo		0 5 10
6	Terdapat 1 Lemari Buku	DBR/Photo		0 5 10
7	Terdapat White Board	DBR/Photo		0 5 10
8	Terdapat 1 Jam Dinding	Photo		0 5 10
9	Terdapat 1 Cermin Gantung	Photo		0 5 10
10	Terdapat Filing Cabinet	DBR/Photo		0

				5 10
11	Terdapat 1 Keranjang Sampah	Photo		0 5 10
12	Terdapat Almanak Institusi	Photo		0 5 10
13	Terdapat Tempat Menyimpan Jas Panitera (Khusus Ruang Panitera)	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.7. Sarana Ruang Hakim				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Meja dan Kursi Kerja Sejumlah Hakim	DBR/Photo		0 5 10
2	Perangkat Komputer dengan Sambungan Internet yang Terkoneksi dengan SIPP dan Printer	DBR/Photo		0 5 10
3	Box File	Photo		0 5 10
4	Almanak Institusi	Photo		0 5 10
5	Lemari untuk Toga Hakim	DBR/Photo		0 5 10
6	Filing Cabinet	DBR/Photo		0 5 10
7	Jam Dinding	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.8. Sarana Ruang Kepaniteraan dan Kesekretariatan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi Kerja Sejumlah Pegawai	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Kursi Hadap Dipanmud/Kasub	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat Komputer/Laptop Terkoneksi dengan Internet untuk Kebutuhan Pekerjaan	DBR/Photo		0 5 10
4	Terdapat Lemari Buku/Arsip Dinamis	DBR/Photo		0 5 10
5	Terdapat Telepon Lokal	DBR/Photo		0 5 10
6	Terdapat Filing Cabinet	DBR/Photo		0 5 10
7	Terdapat Keranjang Sampah	Photo		0 5 10
8	Terdapat Almanak Institusi	Photo		0 5 10
9	Terdapat 1 Jam Dinding	Photo		0 5 10
10	Terdapat Box File Staf	Photo		0 5 10
11	Terdapat Mesin Fotocopy	DBR/Photo		0 5 10
12	Terdapat Mesin Penghancur Kertas	DBR/Photo		0 5 10
13	Terdapat Telepon/Faksimile	DBR/Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.9. Sarana Ruang Panitera Pengganti				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Meja dan Kursi Kerja	DBR/Photo		0 5 10
2	Perangkat Komputer dengan Sambungan Internet yang Terkoneksi dengan SIPP dan Printer	DBR/Photo		0 5 10
3	Box File	Photo		0 5 10
4	Almanak Institusi	Photo		0 5 10
5	Filing Cabinet	DBR/Photo		0 5 10
6	Jam Dinding	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.10. Sarana Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Meja dan Kursi Kerja	DBR/Photo		0 5 10
2	Perangkat Komputer dengan Sambungan Internet yang Terkoneksi dengan SIPP dan Printer	DBR/Photo		0 5 10
3	Box File	Photo		0 5 10
4	Almanak Institusi	Photo		0 5 10
5	Jam Dinding	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.11. Sarana Ruang Bendahara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi Petugas Bendahara	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Buku Kas Penerimaan/Pengeluaran	Dokumen		0 5 10
3	Terdapat Buku Bantu	Dokumen		0 5 10
4	Terdapat Outner Buku Bantu	Photo		0 5 10
5	Terdapat Buku Induk Keuangan/BKU	Dokumen		0 5 10
6	Terdapat Lemari Arsip Dinamis	DBR/Photo		0 5 10
7	Terdapat Mesin Penghitung Uang	DBR/Photo		0 5 10
8	Terdapat Filing Cabinet	DBR/Photo		0 5 10
9	Terdapat Brandkas	DBR/Photo		0 5 10
10	Terdapat Satu Unit Komputer dan Printer	DBR/Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.12. Sarana Ruang Kasir				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi Petugas Kasir	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Skum/Kwitansi	Dokumen		0

				5 10
3	Terdapat Slip/Bukti Pembayaran dari Bank	Dokumen		0 5 10
4	Terdapat Buku Bantu Harian/Buku Bantu	Dokumen		0 5 10
5	Terdapat Buku Jurnal Keuangan Perkara/Buku Bantu	Dokumen		0 5 10
6	Terdapat Buku Induk Keuangan Perkara/BKU	Photo		0 5 10
7	Terdapat Outner Buku Bantu Harian	Dokumen		0 5 10
8	Terdapat Stempel Pengadilan	Photo		0 5 10
9	Terdapat Stempel Lunas	Photo		0 5 10
10	Terdapat Stempel Nomor Perkara	Photo		0 5 10
11	Terdapat Filing Cabinet	DBR/Photo		0 5 10
12	Terdapat Brandkas	DBR/Photo		0 5 10
13	Terdapat Seperangkat Komputer dan Printer yang Tersambung dengan Aplikasi SIPP	DBR/Photo		0 5 10
14	Terdapat Rak/Lemari Jurnal Keuangan Perkara	DBR/Photo		0 5 10
15	Terdapat Rak/Lemari Buku Induk Keuangan Perkara	DBR/Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.13. Sarana Ruang Arsip Perkara dan Umum				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi Petugas Arsip	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Kotak Kartu Kendali	Photo		0 5 10
3	Terdapat Nomorator/Labeling	Photo		0 5 10
4	Terdapat Rak Arsip Bergerak	DBR/Photo		0 5 10
5	Terdapat Folder untuk Katalog	Photo		0 5 10
6	Terdapat Box Arsip	Photo		0 5 10
7	Terdapat Filing Cabinet	DBR/Photo		0 5 10
8	Terdapat Alarm Fire System	Photo		0 5 10
9	Terdapat Katalog Arsip	Photo		0 5 10
11	Terdapat Kartu Peminjaman Arsip	Photo		0 5 10
12	Terdapat Obat Anti Rayap	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.14. Sarana Ruang Mediasi PA/MS				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi	DBR/Photo		0

				5 10
2	Terdapat Hiasan Dinding (yang Bertema Motivasi Damai)	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat Almanak Institusi	Photo		0 5 10
4	Terdapat 1 Jam Dinding	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.15. Sarana Ruang Posbakum				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Mou antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Pengadilan	Dokumen MoU		0 5 10
2	Terdapat Absen Petugas Pelayanan Posbakum	Dokumen absen		0 5 10
3	Terdapat Register Pelayanan Posbakum	Dokumen		0 5 10
4	Terdapat Laporan Petugas Posbakum ke Pengadilan	Dokumen		0 5 10
5	Terdapat Banner Posbakum	Photo		0 5 10
6	Terdapat Jadwal Piket Pelaksanaan Posbakum	Dokumen		0 5 10
7	Terdapat Meja dan Kursi Petugas Posbakum	DBR/Photo		0 5 10
8	Terdapat Dua Kursi Hadap	DBR/Photo		0 5 10
9	Terdapat Papan Nama Petugas Posbakum	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.16. Sarana Ruang Meja Informasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat SK Pengelola Meja Informasi	Dokumen		0 5 10
2	Terdapat Buku Tamu	Dokumen		0 5 10
3	Terdapat Komputer yang Terkoneksi dengan Aplikasi SIPP dan Printer	DBR/Photo		0 5 10
4	Terdapat Kotak Saran	Photo		0 5 10
5	Terdapat Brosur Pelayanan Pengadilan	Dokumen		0 5 10
6	Terdapat Formulir Permohonan Informasi	Dokumen		0 5 10
7	Terdapat Pesawat Telepon	DBR/Photo		0 5 10
8	Terdapat Laporan Petugas Meja Informasi Terhadap Atasan	Dokumen		0 5 10
9	Terdapat ATK	Dokumen		0 5 10
10	Terdapat Meja dan Kursi Petugas Meja Informasi	DBR/Photo		0 5 10
11	Terdapat Name Table Petugas Meja Informasi	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.17. Sarana Meja Pengaduan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat SK Petugas Meja Pengaduan	Dokumen		0 5 10
2	Terdapat Buku Tamu	Dokumen		0 5 10
3	Terdapat Komputer yang Terkoneksi dengan Aplikasi SIPP dan Printer	DBR/Photo		0 5 10
4	Terdapat Formulir Pengaduan	Dokumen		0 5 10
5	Terdapat Pesawat Telepon	DBR/Photo		0 5 10
6	Terdapat Laporan Petugas Meja Pengaduan	Dokumen		0 5 10
7	Terdapat Alat Tulis	Photo		0 5 10
8	Terdapat Meja dan Kursi Petugas Meja Pengaduan	DBR/Photo		0 5 10
9	Terdapat Kursi Hadap	DBR/Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.18. Sarana Ruang Receptionis				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi Petugas	DBR/Photo		0 5 10
2	Papan Informasi/LCD/TV	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat Pesawat Telepon	DBR/Photo		0

				5 10
4	Terdapat Jam Dinding	Photo		0 5 10
5	Terdapat Buku Tamu	Dokumen		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.19. Sarana Ruang Tunggu Layanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Antrian Layanan/Sidang	Photo		0 5 10
2	Terdapat Informasi Prosedur Berperkara	Photo		0 5 10
3	Terdapat Informasi Pengembalian Sisa Panjar	Photo		0 5 10
4	Terdapat Informasi Jadwal Sidang	Photo		0 5 10
5	Terdapat Fasilitas Air Minum, Bahan Bacaan, Charger HP, TV, Wifi.	DBR/Photo		0 5 10
6	Terdapat Kursi /Bangku Tunggu	DBR/Photo		0 5 10
7	Terdapat Area Bermain Anak	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.20. Sarana Ruang Tunggu Sidang, Kaukus dan Mediasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Kursi /Bangku Tunggu	DBR/Photo		0 5 10

2	Terdapat Papan Informasi	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat Alat Pemadam Kebakaran	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.21. Sarana Ruang Pendaftaran				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Terdapat Meja dan Kursi	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Komputer Terkoneksi SIPP	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat Kursi untuk Pendaftar	DBR/Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.22. Sarana Ruang Laktasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Kursi, Meja	DBR/Photo		0 5 10
2	Hiasan Dinding/Ornament Anak	DBR/Photo		0 5 10
3	Pendingin Ruangan (AC/Kipas Angin)	DBR/Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.23. Sarana Ruang Perpustakaan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Rak Buku/Majalah/Surat Kabar	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Laci Penitipan	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat Katalog	Dokumen		0 5 10
4	Terdapat Meja dan Kursi Petugas Perpustakaan	DBR/Photo		0 5 10
5	Terdapat Meja dan Kursi Baca	DBR/Photo		0 5 10
6	Terdapat Buku Peminjaman dan Pengembalian	Dokumen		0 5 10
7	Terdapat Seperangkat Komputer	DBR/Photo		0 5 10
8	Terdapat Nomorator/Labeling	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.24. Sarana Ruang Komputer/Server/IT				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Server	DBR/Photo		0 5 10
2	AC	DBR/Photo		0 5 10
3	Perangkat Jaring Internet	DBR/Photo		0 5 10
4	Router	DBR/Photo		0

				5 10
5	Switch	DBR/Photo		0 5 10
6	Modem	DBR/Photo		0 5 10
7	Acces Point	DBR/Photo		0 5 10
8	Kabel UTP	DBR/Photo		0 5 10
9	Kabel Fiber Optic/Satelit Internet	DBR/Photo		0 5 10
10	UPS	DBR/Photo		0 5 10
11	Printer/Scanner	DBR/Photo		0 5 10
12	Meja dan Kursi	DBR/Photo		0 5 10
13	Pesawat Telepon	DBR/Photo		0 5 10
14	Rak Server	DBR/Photo		0 5 10
15	Pengukur Suhu	DBR/Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.25. Sarana Ruang Gudang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Lemari/Rak Penyimpan Barang	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Buku Kendali Penggunaan Barang	Dokumen		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.26. Sarana Ruang Musholla				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Rak dan Peralatan Sholat	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Rak Sandal/Sepatu	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat Ruang Wudhu	Photo		0 5 10
4	Terdapat Jam Dinding	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.27. Sarana Ruang Pos Penjaga Keamanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Rak Kunci Kantor	DBR/Photo		0 5 10
3	Terdapat Alat Standar Keamanan (Metal Detector, Borgol, Pentungan, Senter, Mantel, Payung, Alat Komunikasi)	DBR/Photo		0 5 10
4	Terdapat Buku Laporan Keamanan	Dokumen		0 5 10

KHUSUS MAHKAMAH SYAR'IAH

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 4.28.1 Sarana Ruang Tahanan Pria/Wanita				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Daftar Nama Tahanan	Dokumen		0 5 10
2	Terdapat Meja dan Kursi	DBR/Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.28.2 Sarana Ruang Tunggu Tahanan Anak				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Tempat Duduk	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Hiasan Dinding Ramah Anak	DBR/Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 4.28.3 Sarana Ruang Penasehat Hukum				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Almanak Institusi	Photo		0 5 10
3	Terdapat Jam Dinding	Photo		0 5 10

4	Ruang Ganti Pakaian	Photo		0 5 10
---	---------------------	-------	--	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 4.28.4 Sarana Ruang Tunggu Jaksa				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Almanak Institusi	Photo		0 5 10
3	Terdapat Jam Dinding	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 4.28.5 Sarana Ruang Polisi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Almanak Institusi	Photo		0 5 10
3	Terdapat Jam Dinding	Photo		0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 4.28.6 Sarana Ruang Diversi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah	Dokumen Acuan	Skor
1	Terdapat Meja dan Kursi	DBR/Photo		0 5 10
2	Terdapat Almanak Institusi	Photo		0 5 10
3	Terdapat Jam Dinding	Photo		0 5 10